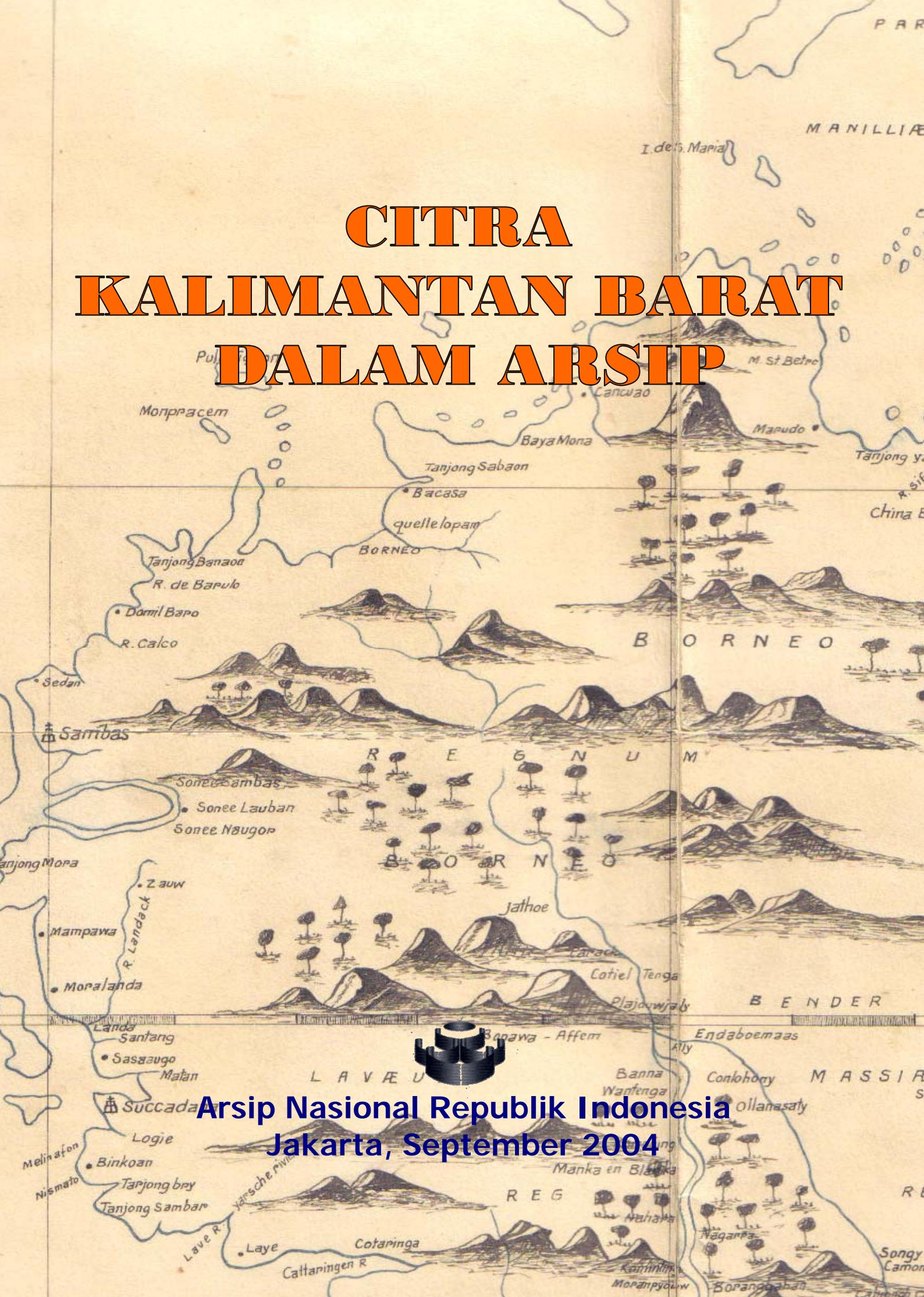


CITRA KALIMANTAN BARAT DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, September 2004



SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya adalah merupakan kegiatan dalam bentuk pengungkapan kembali memori kolektif daerah dalam NKRI. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Dengan mencermati informasi yang tersimpan

dalam arsip akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan kebangsaan sebagai Bangsa Indonesia.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam program ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah yang ada melalui Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian harus dipahami pula bahwa semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini hanyalah berisi sebagian dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 30 September 2004
Kepala,

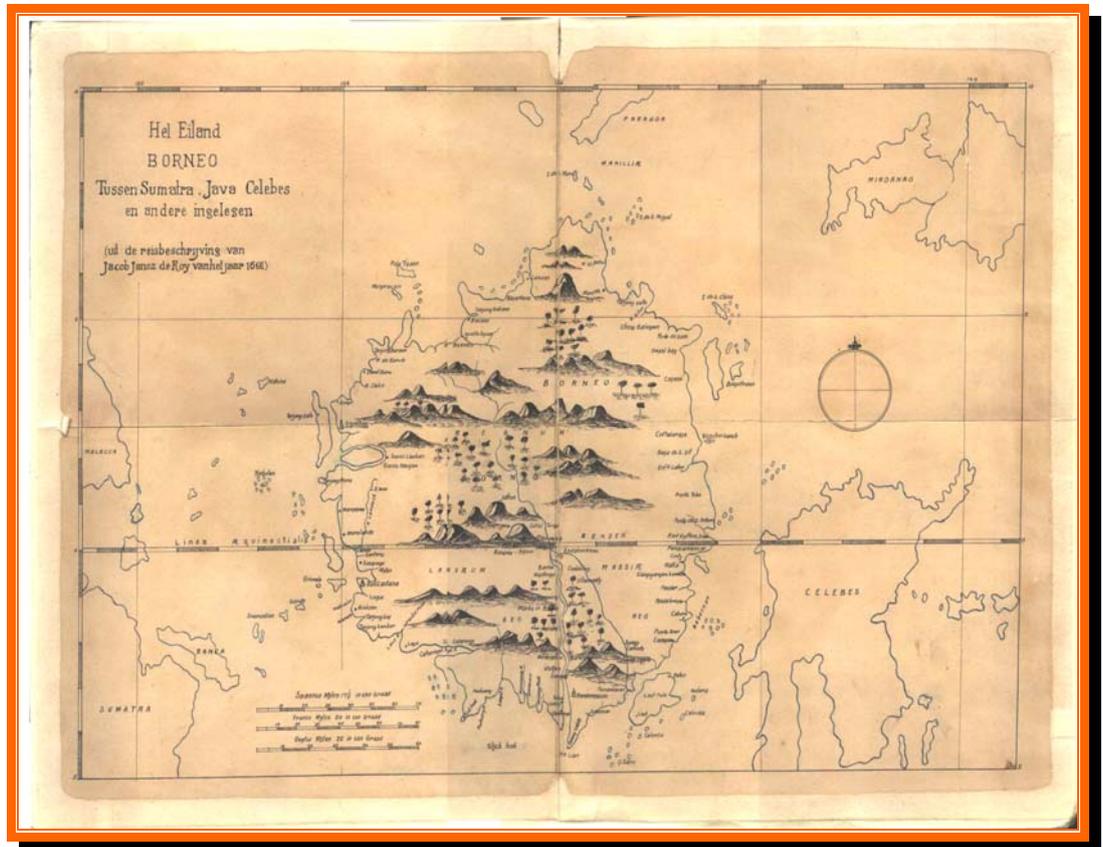
Djoko Utomo

DAFTAR ISI

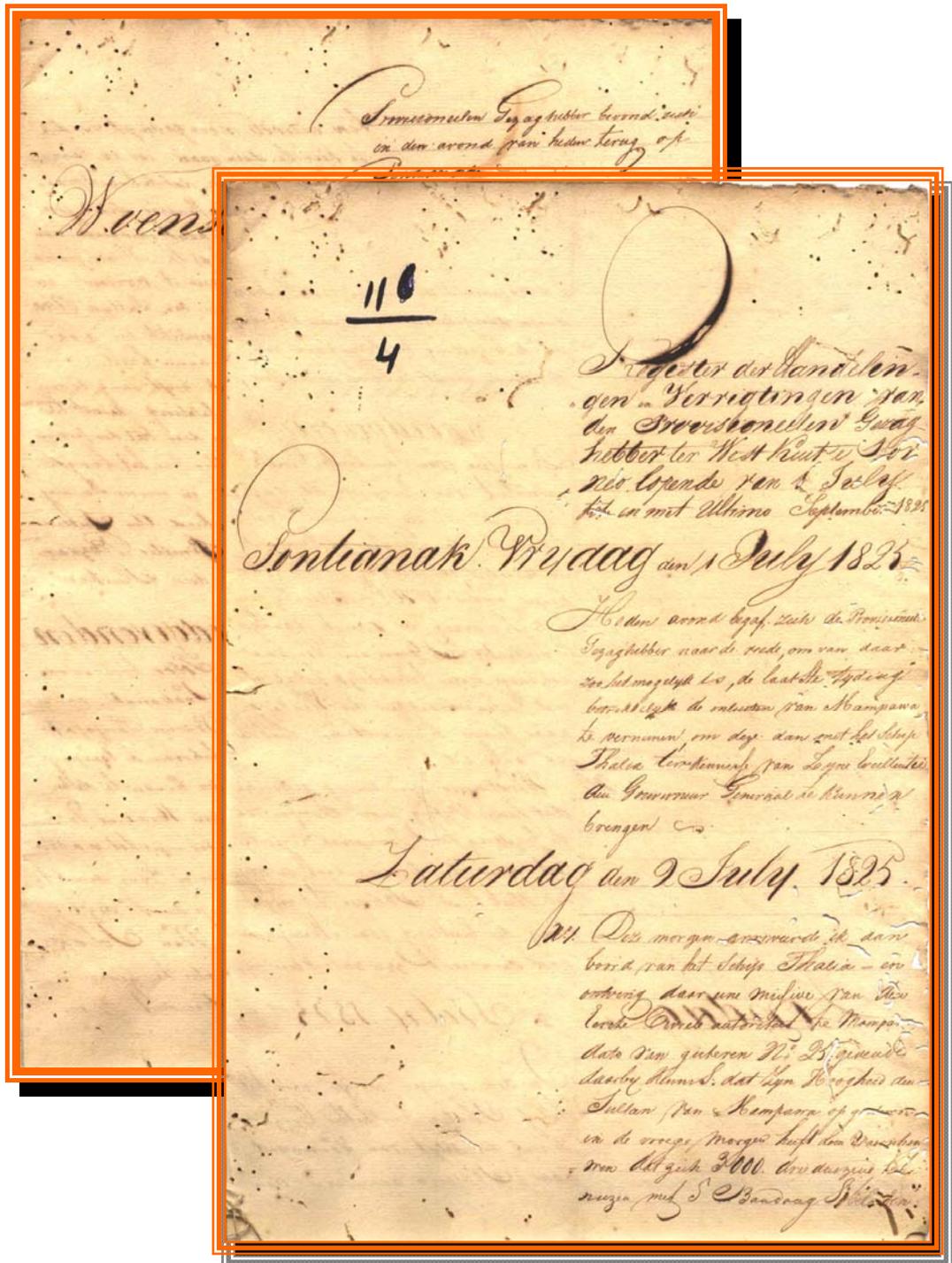
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
Daftar Pustaka	9
Citra Kalimantan Barat Dalam Arsip.....	10
Kalimantan	11
Kesultanan Pontianak, Mampawah dan Landak	19
Provinsi Kalimantan Barat	27
Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden	39
Perjuangan Kemerdekaan	49
Pembangunan	53
Ekonomi	59
Pendidikan	83
Kesehatan.....	88
Pemukiman.....	96
Etnis dan Budaya	109
Perayaan	124
Daftar Arsip Kalimantan Barat Yang Diserahkan	129
Penutup.....	148

**CITRA
KALIMANTAN BARAT
DALAM ARSIP**

KALIMANTAN

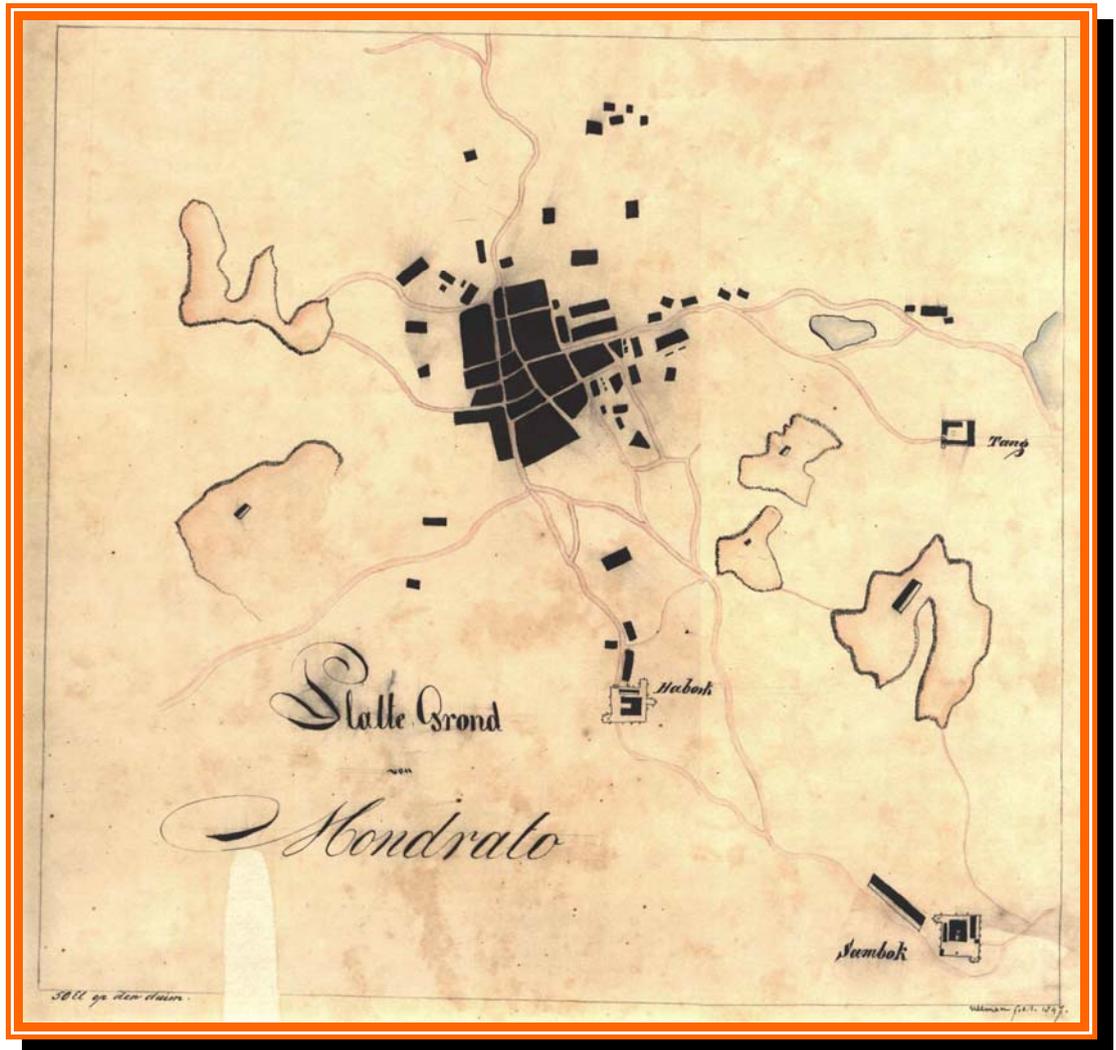


Eiland Borneo in 1691 (Pulau Kalimantan)
Koleksi Peta F. de Haan No.B116

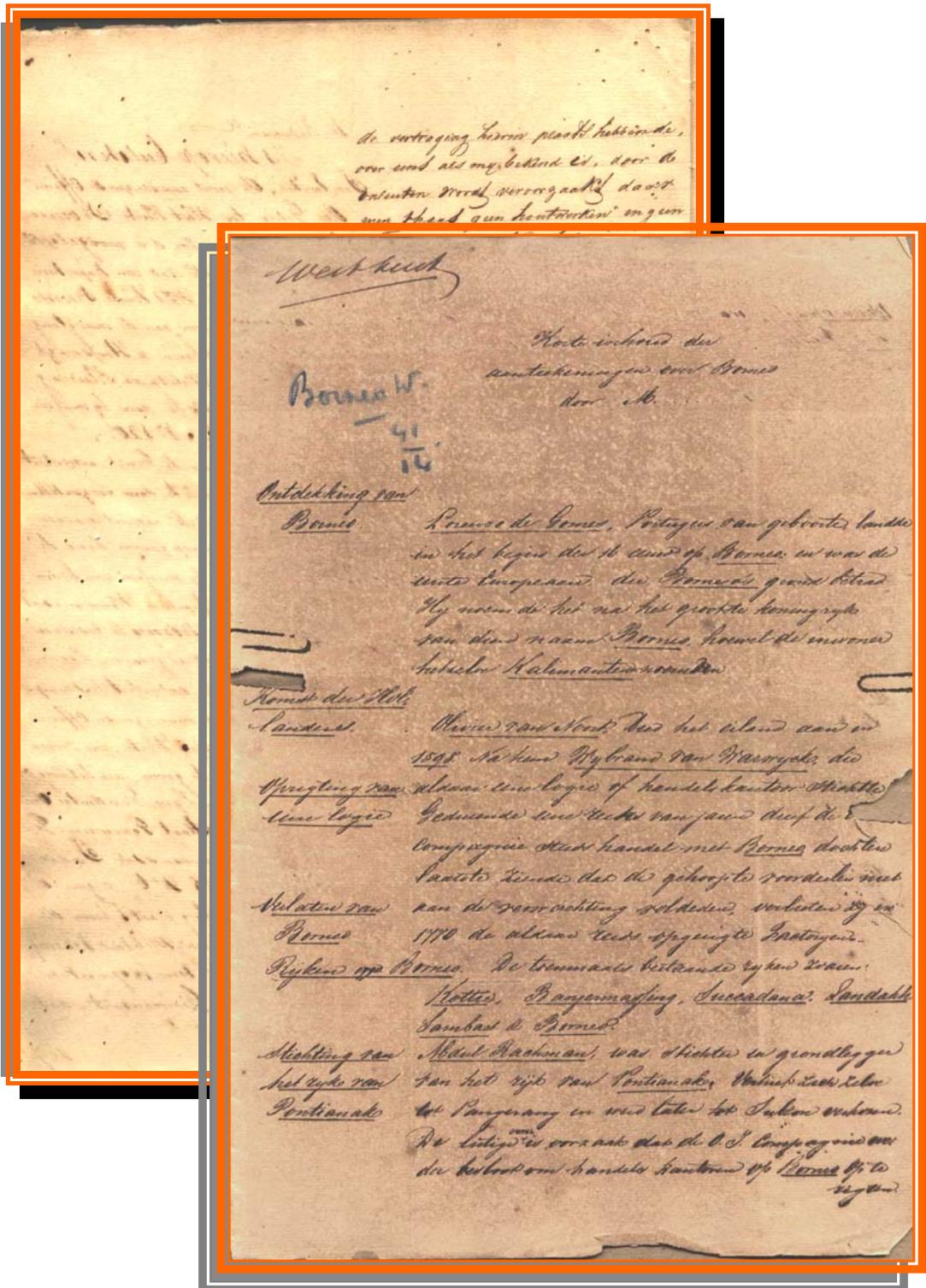


Contoh dua halaman Catatan harian dari seorang kepala wilayah di Kalimantan Barat tanggal 1 Juli - 30 September 1825.

[Borneo West no.86](#)

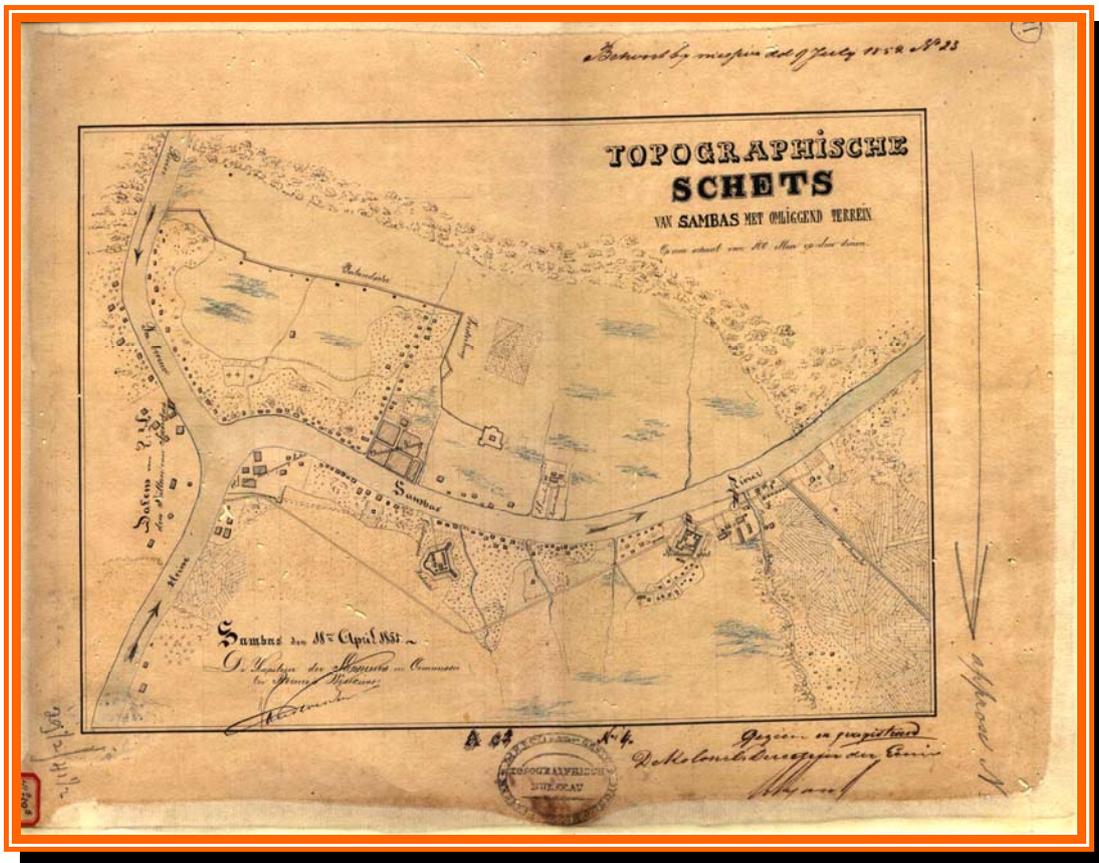


Platte Grond van Mondrato, 1847. (Peta tanah daerah Mondrato)
Koleksi F de Haan No.E 30



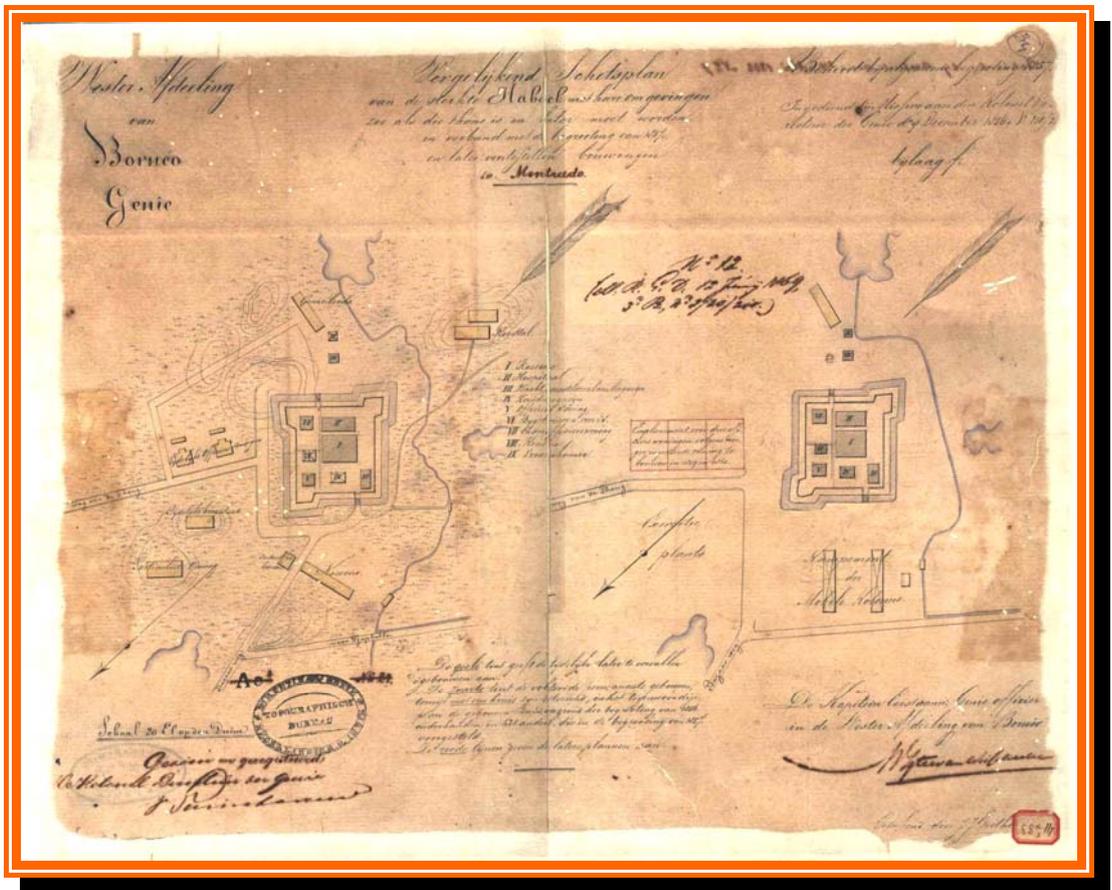
Dua halaman dari 18 halaman catatan sejarah Borneo dari abad ke-19 disertai keadaan wilayah secara singkat tahun 1850.

[Borneo West no.229](#)



Topographische schets van Sambas met omliggend terrein (Peta topografi Sambas dengan daerah sekitarnya), 18 April 1851.

Koleksi Peta khusus no. 11



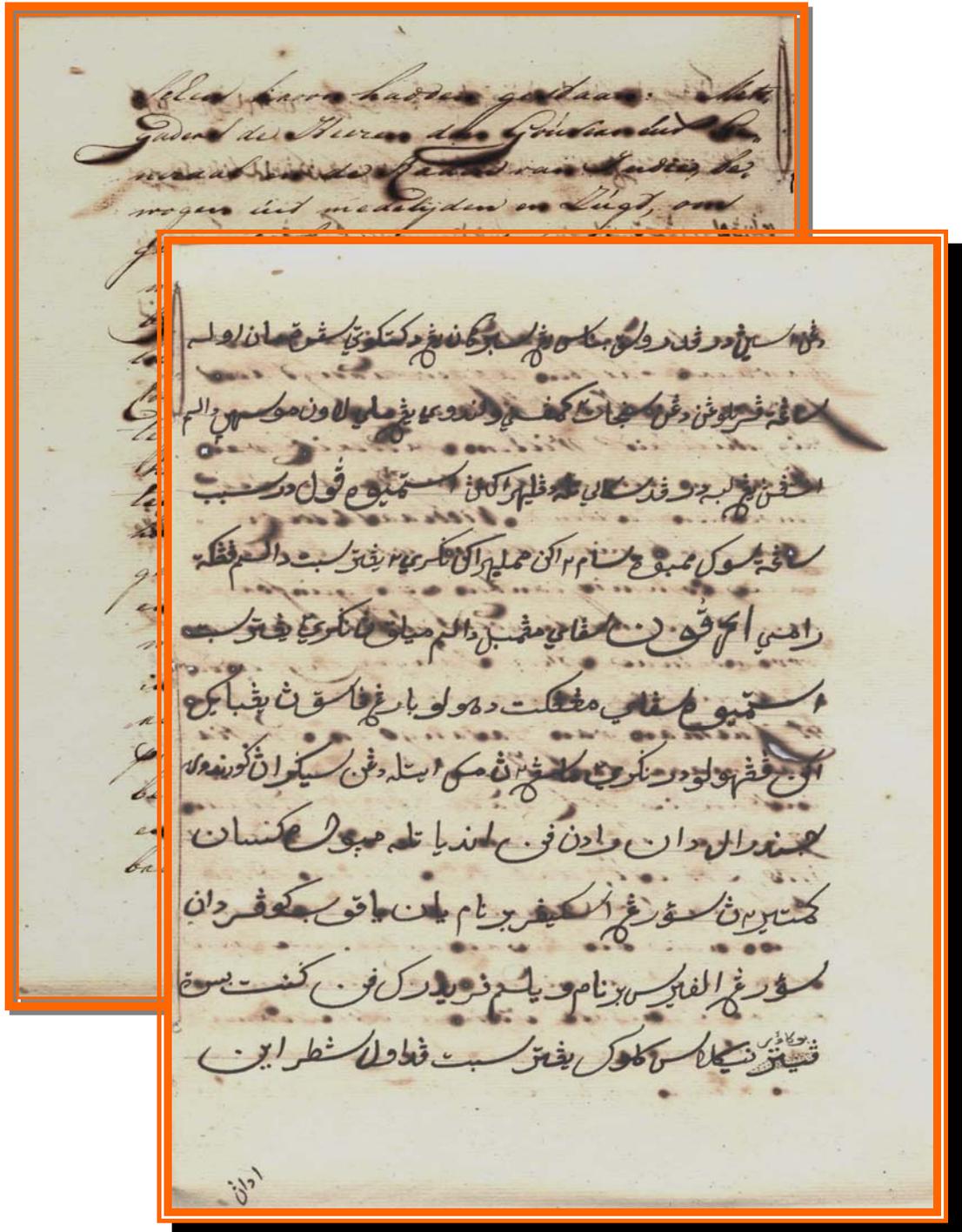
Sketsa Rencana Pembangunan benteng Maboek dan sekitarnya di Montrada yang didanai dengan anggaran tahun 1856 dan 1857.
[Koleksi Peta ANRI No.R.53](#)



Noordelyk gedeelte van het Rijk Sambas en zijne grenze met Broenai (daerah sebelah utara Kerajaan Sambas dan daerah perbatasannya dengan Broenai), 1859.

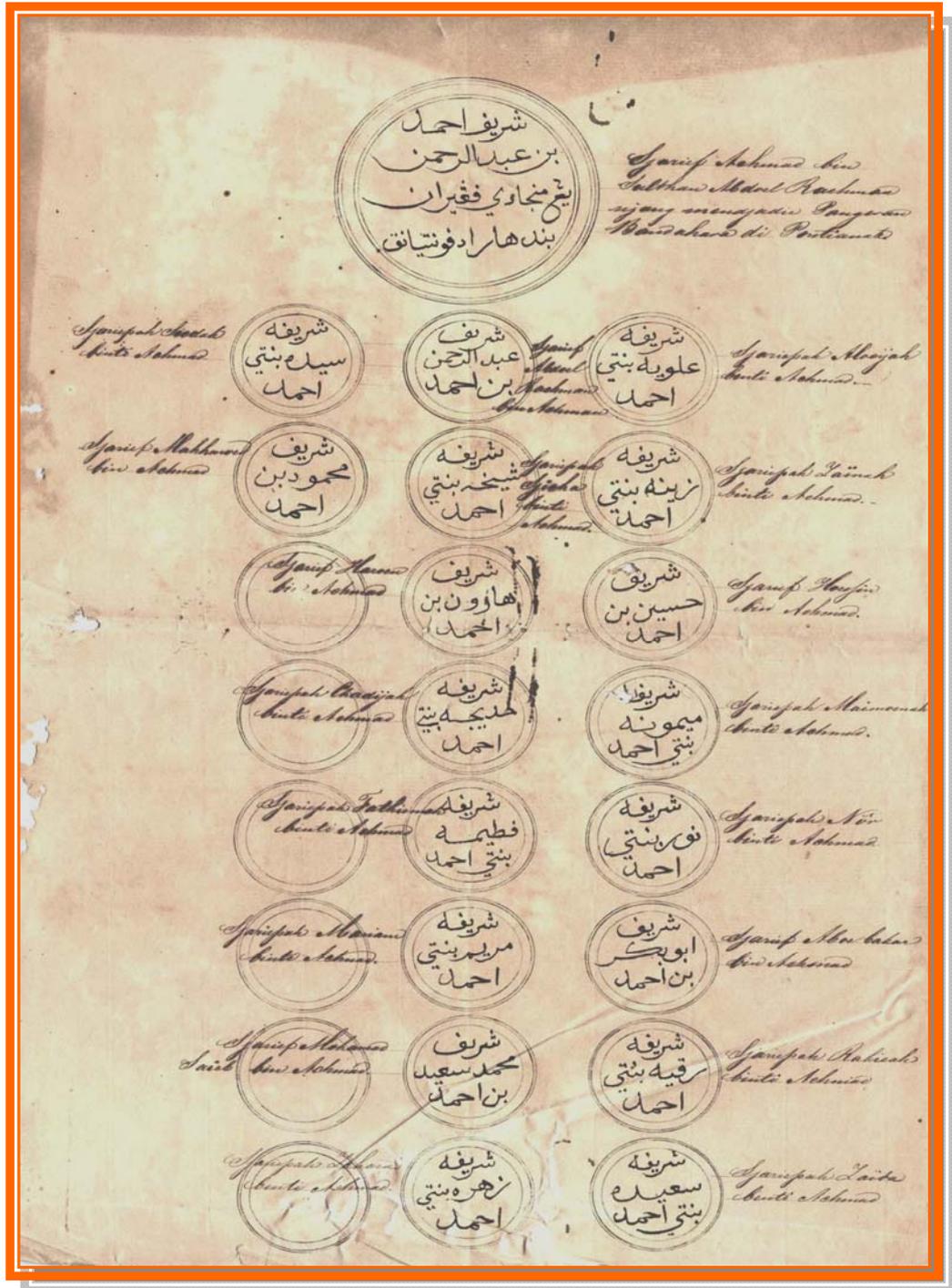
Koleksi Peta F de Haan No.K 52

**KESULTANAN PONTIANAK,
MAMPAWAH DAN LANDAK**



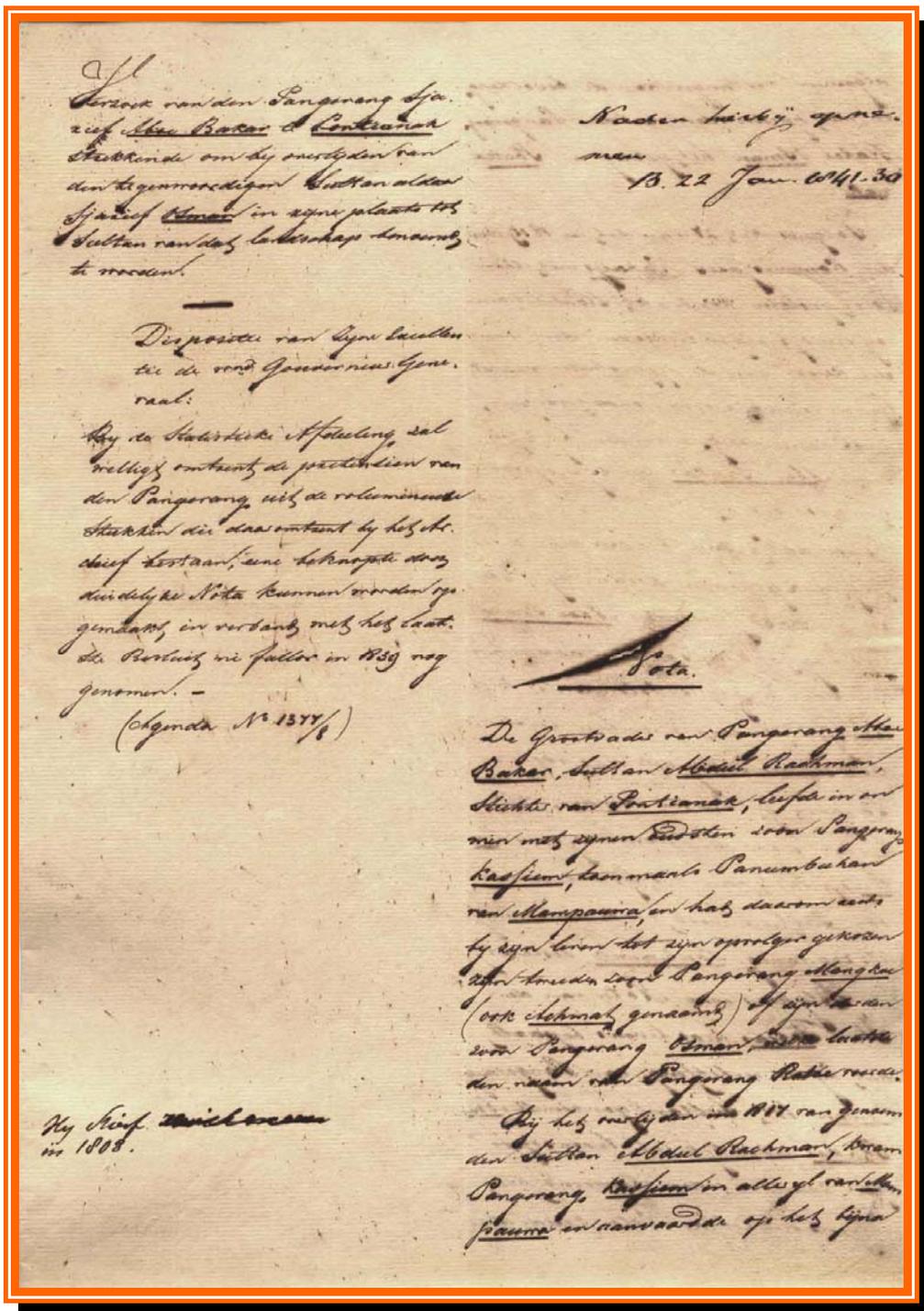
Dua halaman dari 36 halaman Akte van Investiture tusschen de compagnie en de Sulthan van Pontiana en Satango (akte mengenai peresmian pejabat diantara kompani dan Sultan Pontianak dan Satango), yang ditulis dalam dua bahasa 5 Juli 1779.

[Borneo West No.252](#)



Silsilah raja Pontianak mulai dari Sjarief Achmad bin Sultan Abdoel Rachman (Pangeran Bendahara) sampai dengan Sjariepah Zaida binti Achmad dan Sjariepah Zaharie binti Achmad.

[Borneo West 225](#)



Catatan tentang penggantian raja Pontianak tahun 1817 (dari Sultan Kasijem kepada Sultan Abdul Rachman)
Borneo West 193



Surat Sri Sultan Mohammad Zein Abidin dari Mampawah kepada Pemerintah Hindia Belanda mengenai keadaan keluarga Kesultanan, 17 Mei 1823.

[Koleksi Surat Emas No. 14](#)

keradjaan-keradjaan, djoega samoes hel
pendjagan serta pemeriksaan dalam men-
djalenkan pekerdjaan perkara bes ini ma-
ka pemerintah keradjaan akan memboeat
samoeanja itoe menoeroet peratoeran-pe-
ratoeran jang ditetapkan oleh Sripadoeka
toean Resident dari residentie Sebelah
Barat Poelau Borneo.

Paragraf 6.

Segala perselisihan jang toemboeh
dari pada steeren soerat ini ditimbang
sependjang hertinja toelisan behasa Be-
landa.

Termaktoeb hari ini pada tanggal
10 September 1920 di KERTA-MOELIA.

antwoording van dit middel soo verklaart
het Zelfbestuur zich te zullen gedragen
naar de ter zake door den Resident der
Westerafdeeling van Borneo vast te stel-
len regelen.

Artikel 6.

Bij geschillen omtrent de uitleg-
ging van de in deze verordening voorko-
mende bepelingen is de Nederlandsche
tekst bindend.

Gedaen op heden den 10den September 1920
te KERTA-MOELIA.

Het Zelfbestuur van K O E B O E,

In overleg met mij tevens voor legalisatie van opgemelde handteekeningen.
Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur te Pontianak,

Gezien en accoord bevonden:
De Afdelingschef,



GOEDGEKEURD:
Pontianak, den 11en Mei 1921.
Resident der Westerafdeeling van B o r n e o.
Namens dezen:
Assistent-Resident ter beschikking,

Penandatanganan Peraturan mengenai pemungutan pajak di Kerajaan Koeboe Residensi Kalimantan Barat, 25 Agustus 1921. [BB No. 1108](#)



Istana pada pesta ulang tahun Sultan Pontianak
KIT. No.0325/032

**PROVINSI
KALIMANTAN
BARAT**

Salinan: Sk. Pandji Rakjat
tg. 13-5-'47 No. 51 Th. ke 2.

1.

Araes Permasaan Indonesia

KALIMANTAN BARAT MENDJADI DAERAH ISTIMEWA.

mempunyai pemerintahan sendiri dan turut
menjoesoen Negara Indonesia Serikat.

Rentjana Anggaran-Dasar (Statuut) Kalimantan Barat

Komisi Djenderal oentoe Hindia Belanda mewakili Pemerintah
Belanda: Setelah mengetahoei mosi jang diterima oleh Dewan Kaliman-
tan Barat pada tanggal 20 Maart 1947 tentang soesoenan ke-tatanegaraan
baroe;

Mendengar keterangan-keterangan Ketoea Dewan terseboet;
Mengakoei Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa dengan
pemerintahan sendiri; serta bermoeafakat dengan Dewan Kalimantan Barat
tentang tempat jang dapat didoeoeki oleh daerah ini dalam soesoenan
ketatanegaraan Indonesia jang baroe;
dan telah mendapat persetoedjoean dengan Dewan terseboet
tentang azas-azas jang mengemal hal itoe;
Sebagai boekti disoesoen dokoemen ini dan telah ditanda-
tangi oleh Komisi-Djenderal dan Ketoea serta para wakil Dewan Kaliman-
tan Barat itoe.

Fatsal 1.

Kalimantan Barat bersedia akan toeroet membantoe membangoenkan
satoe soesoenan ketatanegaraan Indonesia baroe sebagai tertjantoean da-
lam persetoedjoean jang telah diikat pada tanggal 25 Maart 1947 antara
Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, asal menoeoet
dan dengan sjarat2 sebagai jang dioeraikan dalam fatsal2 jang berikoet.

Fatsal 2.

(1) Kalimantan Barat hanja bersedia oentoe toeroet membantoe
akan membentoeok satoe negara Kalimantan dan Negara Indonesia Serikat,
djika tertjapai persetoedjoean tentang penjoesoenan dari dan pembagian
kekoesaan antara negara dan perserikahan (federatie) dan djika diteri-
ma azas-azas jang dioeraikan dalam fatsal2 jang berikoet.

(2) Kalimantan Barat djoea sebagai sebahagian dari negara Ka-
limentan, akan tetap memegang peratoeran dan pemerintahan tentang oer-
oes-oeroesan diri sendiri dalam loesanja jang djatoeh kepada Dewan
Kalimantan Barat menoeoet oendeng-oendang organik jang berlakoe seka-
rang oentoe Dewan terseboet, sependjang tidak diadakan peroebahga2
dalam hal itoe dengan persetoedjoeanja.

(3) Oentoe mengoeroes kewadjaban-kewadjaban jang akan disedia-
kan goena badan-badan poesat di Kalimantan Barat dan perhoeboengan-per-
hoeboengan antara daerah ini dan Pemerintah poesat, maka di Kalimantan
Barat dapat didirikan satoe perwakilan istimewa dari Pemerintah poesat
ini.

Fatsal 3.

Djika dimoesai dengan pembentoean Negara Indonesia Serikat
dan penjoesoenan Uni Belanda-Indonesia sebeloenja diadakan satoe ne-
gara Kalimantan, maka Kalimantan Barat akan toeroet serta dalam pemben-
toekan dan penjoesoenan itoe atas dasar jang sama dan dengan hak-hak
jang sama sebagai satoe negara.

Fatsal 4.

Kalimantan Barat berpendirian, bahwa dalam menoeogoe penje-
lesaan penjoesoenan ketatanegaraan baroe, maka kedoeoekan jang seka-
rang dari Keradjaan Belanda dalam hoekoem negara dan hoekoem bangsa-
bangsa dan oleh karena itoe kedaulatan Belanda ternadap seloeroeh In-
donesia serta oeroesan perhoeboengan loear negeri oleh Belanda tetap
berlakoe, terketjoesali tindakan-tindakan jang sjan jang akan didjalan-
kan menoeoet fatsal 15 dari persetoedjoean jang diseboet dalam fatsal
1.

Fatsal 5.

Salinan surat kabar Panji Rakyat No. 51 Tahun ke-2 tentang rencana anggaran dasar Kalimantan Barat untuk menjadi daerah istimewa yang mempunyai pemerintahan sendiri dan turut menyusun Negara Indonesia Serikat, 13 Mei 1947.

[Kementerian Pertahanan No. 788](#)

VERSLAG BEZOEK WEST BORNEO
20 - 27 Mei 1947.

-0-

1. OPDRACHT.

Het voeren van besprekingen over de voorzieningen verband houdende met de ondertekening van het West Borneo statuut op 12 Mei 1947 voor wat betreft:

- a. Taak overdracht van het Land aan de daerah West Kalimantan.
- b. De organisatie van het regeer-apparaat van deze daerah.

2. Besprekingen werden gevoerd met den Kepala Daerah, den Resident, de leden van het dagelijksch Bestuur van den West Kalimantan Raad, den Secretaris en eenige andere leden van dien Raad, bestuursambtenaren, het hoofd en onderhoofd van de Nirub organisatie voor dit gebied.

TAAK OVERDRACHT.

3. Door den Resident en den Kepala Daerah werd aangedrongen op onverwijlde overdracht aan de wetgevende en bestuursorganen van de daerah zoo veel mogelijk van:

- 1e. de geheele tot de autonome sfeer van de daerah behorende Landstaak.
- 2e. de voor de uitvoering in mede bewind binnen het gebied van West Kalimantan in aanmerking komende bevoegdheden met betrekking tot aan het Land voorbehouden onderwerpen van centrale overheidszorg.

4. Hierbij staat voor oogen dat de functie van Resident van West Borneo zal komen te vervallen en over zal gaan op de bestuursorganen van de daerah.

5. Als vertegenwoordiger van de centrale Regeering zal deze autoriteit plaats maken voor een Regeringscommissaris voor de daerah West Kalimantan die ten aanzien van de daerah tot taak heeft:

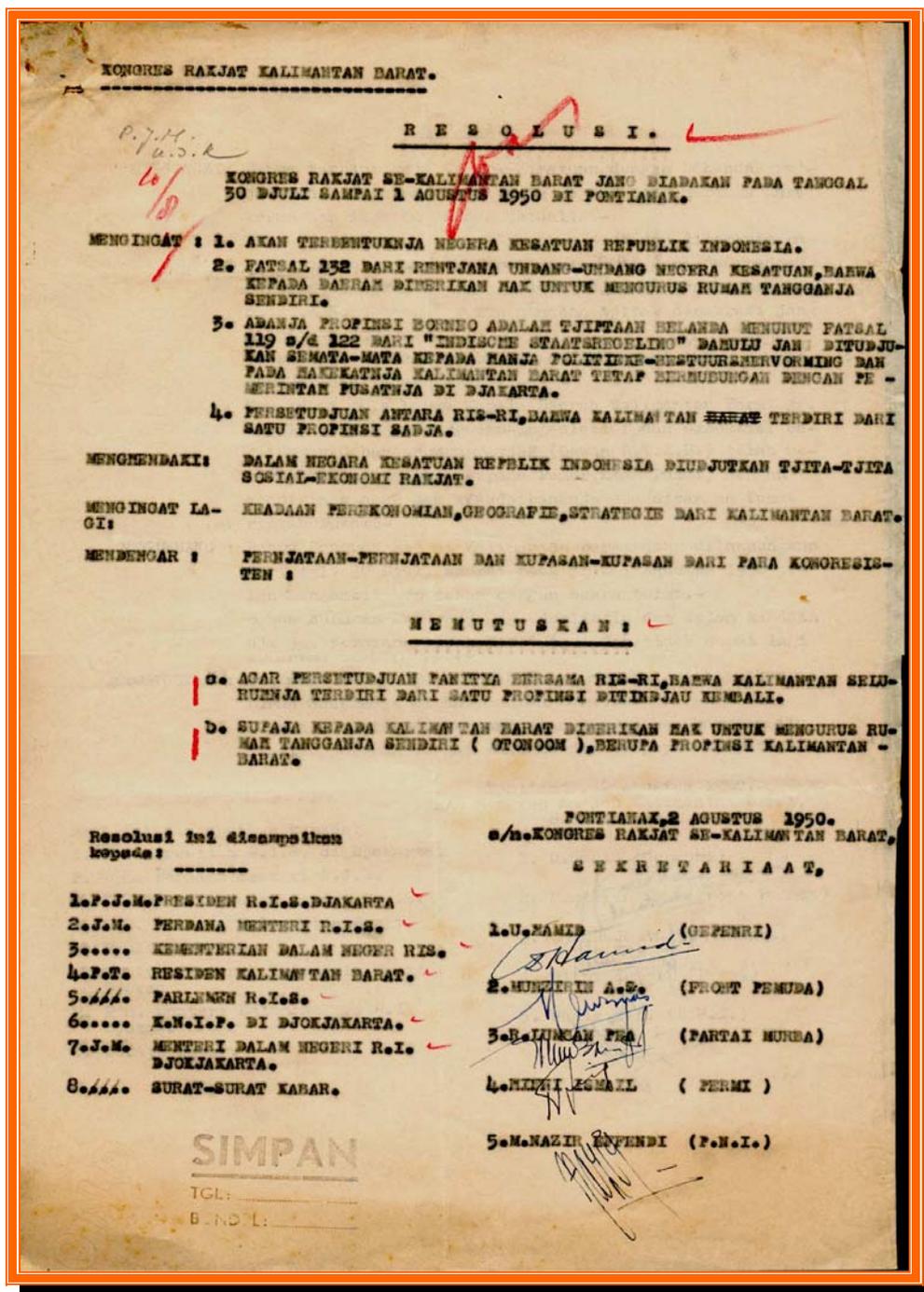
- a. raad en steun te verleen bij de organisatie van de daerah diensten, alsmede bij de wetgeving en bestuursvoering in het algemeen.
- b. te waken voor een rechtvaardige behandeling van de onderscheidene bevolkingsgroepen en voor de naleving van de in het West Borneo statuut in het bijzonder in de artikelen 2 (tweede lid) en 5 tot en met 7 bedoelde bepalingen.

Teneinde den Regeringscommissaris in staat te stellen deze taak te vervullen ware voor te schrijven, dat het het daerah bestuur dezen functionaris geregeld op de hoogte zal houden van de behandeling van alle belangrijke aangelegenheden en de door hem gevraagde inlichtingen te verstrekken.

6. De autonome taak van de West Kalimantan-raad omvat de volledige uitoefening, ook met betrekking tot de landsonderhoorigen, van de aan den raad door de Zelfbesturen overgedragen ingevolge de politieke contracten of de Zelfbestuursregelen 1938 aan de Zelfbesturen gelaten overheidsbevoegdheden.

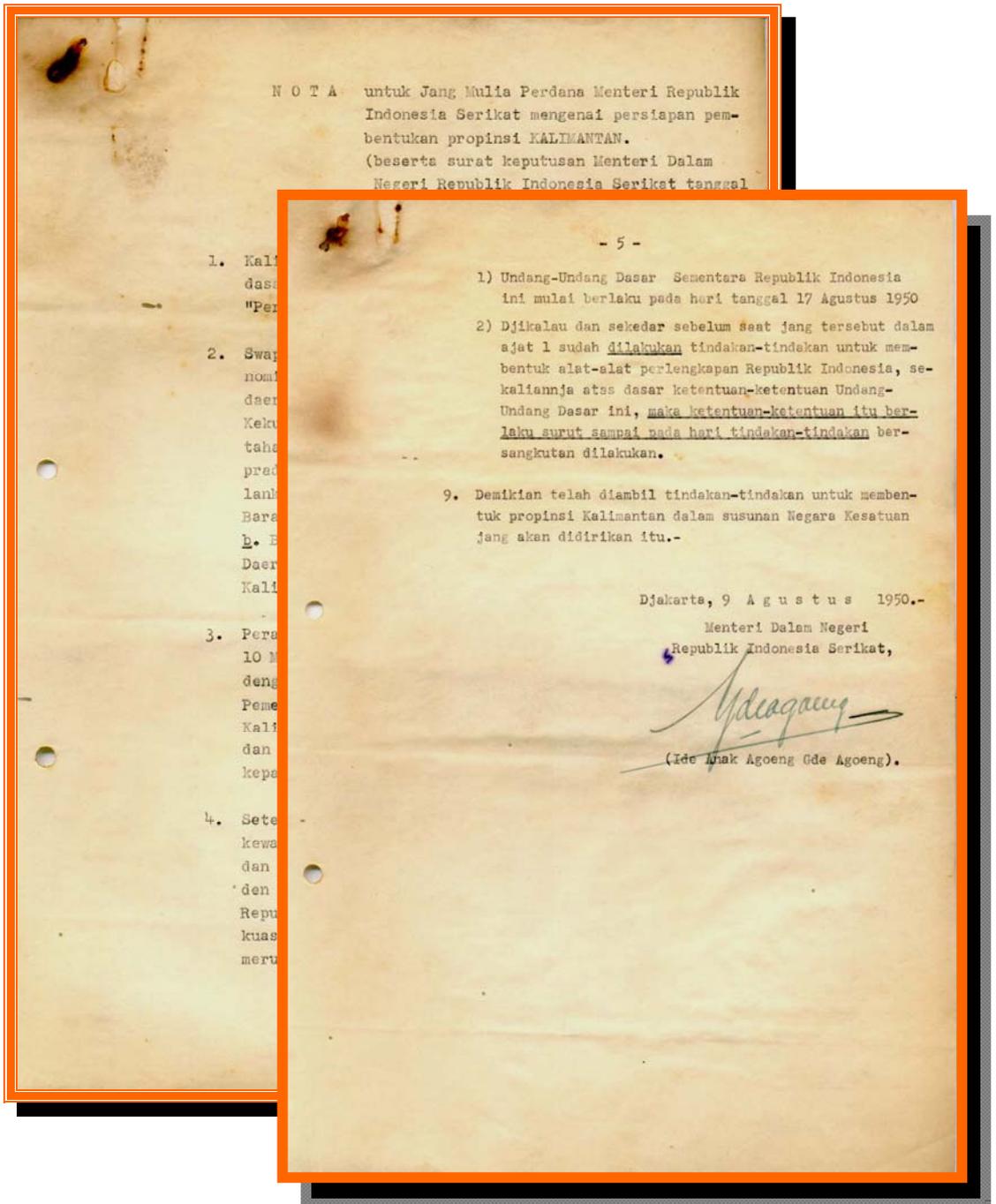
Verslag bezoek Borneo West (Laporan kunjungan ke Kalimantan Barat), tanggal 20 – 27 Mei 1947.

Algemeene Secretarie No. 1314



Resolusi dari kongres Rakyat se-Kalimantan Barat yang diadakan pada tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 1950 di Pontianak tentang peninjauan kembali Kalimantan yang hanya satu provinsi dan usulan Kalimantan Barat sebagai otonom.

[Kabinet Presiden RIS No. 163a](#)



Halaman awal dan akhir Nota Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (Ida Agoeng Gde Agoeng) tanggal 9 Agustus 1950 tentang persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Barat.

Kabinet Presiden RIS No. 163b

Berhubung dengan tulisan P.T. Residen Kalimantan Barat no 4278/ G.P. tgl 1/8-1950 kepada Badan Pertimbangan mengenai Kota-Pradja Pontianak yang harus disesuaikan dengan perubahan zaman, maka sebagai pertimbangan, dibawah ini disampaikan pendapat2, baik dari Badan Pertimbangan sendiri, maupun pendapat2 penduduk dalam Kota-Pradja Pontianak.

Untuk memperoleh pendapat2 dari penduduk Kota-Pradja Ptk, maka oleh Badan Pertimbangan telah diadakan suatu rapat umum yang dihadiri oleh wakil2 partai perkumpulan, wakil2 Residen K.B., Wali Kota Ptk, Domang2, Kepala2 kampung (pongawa2), ketua2, anggota2 Dewan Gemcoonto Ptk, jaitu pada tgl 10 Agustus 1950 bertempat digedung Persatuan Buruh Indonesia Ptk. Dengan wakil2 dari Swapradja telah terlebih dahulu diadakan perundingan ini pada tgl 9/8-1950 diruangan Badan Pertimbangan. Hasil2 dari perundingan ini akan dituliskan dalam fatsal2 yang berikut.

1. Status Kota-Pradja.

Pembentukan Dewan Kotapradja Ptk adalah atas dasar besluite-instelling dari Pemerintah "Kerajaan (Swapradja) yang terakhir no-40/1946/PK tgl 16/9-1949 yang disebut "Peraturan Pemerintah Kota-Pradja" no 2, yang disetujui oleh fd. Residen Kalimantan Barat tgl 22-9-1949 no 223/L.3. Keterangan2 selanjutnja mengenai pembentukan ini bisa didapat dari:

- a. Keputusan Swapradja Ptk. tgl 14/3-1946. no 24/1-1946/PK.
- b. Pengesahan Res. Borneo Barat tgl 14/8-1946.
- c. Keputusan dari Komisaris Pemerintah Umum untuk Kalimantan Timur Besar tgl 28/9-1946 no A.R.C. 4/1/20.
- d. Perubahan keputusan Swapradja Ptk. tgl 18/5-1948 no 22/1948/PK dan
- e. Pengesahan fd. Residen Kalimantan Barat tgl. 29/5-1948 no 144/L.3.

Pembentukan Dewan Kota-Pradja Ptk seterusnya dengan memperhatikan fatsal 3 dari Politieke Contract diantara Govt. Hindia Belanda dengan Pemerintah "Kerajaan Pontianak dan ketetapan pada II dari keputusan Lt. Gov. Djendral Hindia Belanda tgl 9/4-1946 no 3 (STBLD. 1946 n. 27).

Titik berat dari pembentukan Dewan Kotapradja Ptk ialah atas dasar "Kepentingan Umum memerlukan, supaya diadakan perubahan dan peraturan tetap".

Melihat hasil2 dari pekerjaan Kotapradja Ptk mengenai kepentingan umum sedari pembentukannya sampai sekarang, tidaklah sebagai diharapkan oleh penduduk Pontianak.

Hak2 Kewajiban kekuasaan Pemerintah Kota Ptk.

Menurut fatsal 6 ayat sd 3 :

1. Pemerintah Kota Pontianak menerima penjerahan segala hutang dan piutang dari Stadsfonds Ptk.
2. Pemerintah Kota Pontianak selanjutnja djuga menerima penjerahan dari segala harta benda Stadsfonds Pontianak yang ada jaitu rumah penginapan, dan gedung2, rumah2 kediaman, pasar, umum bor, urusan pemadatan api, rumah pemotong hewan, tempat pekerjaan umum, kios, lapangan tempat bersepeda dan pelampung penjerobangan.
3. Kepada Pemerintah Kota Pontianak diserahkan pemeliharaan, perbaikan dan pembikinan djalan2 umum, lorong2, lapangan dan taman2 dengan tanaman2 diatasnja, tepian, gili2, galangan2, parit2, pal. es2 kilometer, nama2 djalan, djembatan2 terowongan2, barau2 dan urusan yang dahulunya dibawah pengurusan Stadsfonds atau djuga Pemerintah Kerajaan Pontianak.

Perlu diterangkan disini, bahwa tanah/porceel dalam Kota-Pradja tidak diserahkan kepada Dewan Kota-Pradja, akan tetapi masih ditangan Swapradja (Landchap Ptk), sehingga Kotapradja tidak berhak mengambil hasil/gewa dari tanah dilingkungan Kotapradja.

Pendapat Badan Pertimbangan tentang pembentukan Kota-Pradja.

- a. melihat tjara pekerjaan Kota-Pradja dan kekuatan keuangannya, maka tidak bisa diharapkan yang kepentingan umum dapat dipenuhi. Mengenai keuangannya akan didjelaskan dalam fatsal yang berikut.

Nota dari Badan Pertimbangan Pemerintah Kalimantan Barat tentang telaah rencana pembentukan Kota Praja Pontianak. 11 Agustus 1950
Kabinet Presiden No. 8251

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 58 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang berlakunja
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun
1950 No.16 jo. No.23 bagi segenap pegawai Negeri Sipil
Republik Indonesia (Negara Kesatuan) mulai tanggal 1
Djuli 1950;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan pegawai jang
namanja tertera dalam daftar terlampir dalam pangkat dan
gadji berdasarkan peraturan tersebut diatas;
- Mengingat pula : Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang hak pe-
ngangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa jang namanja tersebut dalam daftar lampiran ini,
terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1950 diangkat pada djabatan sebagaimana
termaktub dalam ruang 8 daftar lampiran tersebut dan kepadanya diberikan
gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang sjaah, jang bersangkutan
dengan djabatannja,
dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur dan diperhitungkan sebagai-
mana mestinja.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kabinet Perdana Menteri,
5. Dewan Menteri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Djawatan Urusan Perdjalanan Negeri,
8. Kantor Penetapan Pajak,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan seperlunja.

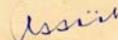
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 April 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,



ASSAHT.

Keputusan Presiden RI No.58 Th.1951 tentang pengangkatan
Dr. Murdjani sebagai Gubernur Kalimantan. 1951
[Sekkab Keppres No. 284](#)

Sidang III.

RAPAT 59.

Hari Djum'at, 19 Oktober 1956.

(Djam panggilan: 08.30).

Surat-surat masuk — Djawaban Pemerintah dalam babak ke-I mengenai rantjangan Undang-undang pembentukan daerah otonom Propinsi Atjeh (P. 86) dan rantjangan Undang-undang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (P. 85).

Ketua: Arudji Kartawinata.

Sekertaris: S. Poerwadi.

Jang hadir 178 anggota:

Mr Sartono, S. Hadikusumo, H. Hasan Basri, Ismail Napu, Udin Sjamsudin, Anwar Hariono, B. J. Rambitan, H. Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Dr H. Ali Akbar, T. S. Mardjohan, H. Zainul Arifin, Ismangoen Poedjowidadao, Siahoeddin Latif, H. A. Chamid Widjaja, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Nj. Moedikdio, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Mangunsarkoro, Djokosoediono, Prawoto Mangkusamito, Ajip Muchamad Dzukhri, Sukatno, I. B. P. Manuaba, Ni, Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, Soepeno Hadisiswojo, Nj. Suharti Suwanto, Mr Boerhanoeddin Harahap, K. H. Moh. Dachlan, F. Runturambi, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. H. Kasman Singodimedjo, Gusti Abdul Moeis, S. Utarjo, K. H. Fakhri Usman, Nj. Soepeni Poedjoentoro, Abdullah Gathmyr, Mr Sudiono Hardiosudiro, Mr Wongsonegoro, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sudisman, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur el Ibrahimy, H. Munir Abisudjak, Nj. Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Nj. Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetjo Mertodimoelio, Moersid Idris, H. Masjhur Rifai, M. Caley, S. D. Bili, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Maniudin Brodjotrano, Abdul Aziz Diar, Tioo Tik Tjoen, Sudjito, K. H. Misbach, H. Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudjojo, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Zainal Arifin Tanamas, Dr Ambio, Wasis, Moeljadi Notowardjo, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poejer, K. Achmad Ghozali, R. K. H. Mustain, Nj. Hadinilah Hadi, R. Soedjono Prawirosoedarso, H. Sjafie, H. Andi Sewang Daeng Muntu, Hussein Saleh Assegaff, H. Muhammad Sjaifuddin, Muhammad Noor, H. Sen-

duk, H. Moehamad Akib, Mohamad Soleman, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, Mawardi Noor, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nia' Diwan, K. H. Masjhur Azhari, Dr M. Isa, Abdulrozak, Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Nj. Rahmah el Junusiah, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I G. G. Subamia, Anuarbek, L. Kape, Mohammad Thalib Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Rd. Djerman Prawirawinata, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, Soeroso Pringgoeseno, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Nj. Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, S. M. Thaher, Rd. Mohamad Basah, E. Moh. Mansjir, Katamsi Soetisna Sendjaja, Nj. S. Marijahah Djoenaidie, Dr R. Rustamadji, Siswojo, Nj. Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Nj. Sutjah Surya Hadi, Atmodarminto, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djoioadiprodo, Djadi Wirosubroto, K. H. Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosoekardjo, Balja Umar H. Achmad, Moh. Anwar Zain, Tjugojo, Nj. Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Soebadio Sastroatomo, Sudrasman, Z. Imban, R. Abdul Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradia, Prof. Drs R. Soenardjo, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isaeni, D. N. Aidit, Nj. Suzanna Hamdani, Muhamad Padang, Silas Papare, A. B. Karubuy.

Wakil Pemerintah: Mr Soenarjo, Menteri Dalam Negeri.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Jang hadir ada 151 anggota. Adapun atjara buat hari ini jaitu mendengarkan keterangan Pemerintah sebagai djawabannya atas pemandangan umum para anggota dalam babak pertama.

Sebelumnja kita meningkat pada atjara tunggal buat hari ini baiklah saja menjampaiakan beberapa pengumuman, bertalian dengan atjara untuk hari Selasa tanggal 23 Oktober 1956 jang akan datang, jaitu pengumuman dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tentang perubahan atjara rapat Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 23 Oktober nanti:

„Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini mengumumkan, bahwa berdasarkan keputusan rapat Panitia Permusjawaratan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 1956, atjara rapat Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 23 Oktober 1956 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Selasa, 23 Oktober 1956.

09.00 Pleno:

- a. Melanjutkan atjara tanggal 22 Oktober 1956;
- b. Usul interpelasi Siauw Giok Tjhan dan kawan-kawannya, mengenai pengangkatan-peng-

Halaman awal jawaban Pemerintah mengenai rancangan Undang-Undang pembentukan daerah otonomi Provinsi Kalimantan Barat, 19 Oktober 1956.

Risalah DPR RI No. 171

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG No. 25 TAHUN 1956 ✓

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN-BARAT, KALIMANTAN-SELATAN DAN KALIMANTAN-TIMUR.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa, mengingat perkembangan ketata-negaraan serta hasrat rakjat di Kalimantan dianggap perlu untuk membagi daerah otonom Propinsi Kalimantan sementara dalam tiga bahagian, jaitu Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur, masing-masing dalam batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri sebagai daerah otonom Propinsi pula;
- b. bahwa, berhubung dengan pertimbangan ad a materi yang diatur dalam Undang-undang Darurat No.2 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.8) tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan perlu diganti dengan undang-undang dimaksud dibawah ini;

- Mengingat : 1. pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
2. Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M E M U T U S K A N :

I. Mentjabut Undang-undang Darurat No.2 tahun 1953 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 No.8).

II. Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN-BARAT, KALIMANTAN-SELATAN DAN KALIMANTAN-TIMUR.

B A B I.
K E T E N T U A N U M U M.

Pasal 1.

Daerah otonom Propinsi Kalimantan sebagai dimaksud dalam Undang-undang Darurat No.2 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.8) dibubarkan dan wilajahnya dibagi untuk sementara waktu menjadi tiga daerah tingkatan ke-I, yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sebagai berikut:

1. Propinsi Kalimantan-Barat, yang wilajahnya meliputi daerah-daerah otonom Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas-Hulu dan Kota Besar Pontianak, tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 9 sampai dengan 15 Undang-undang Darurat No.3 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.9);

2. Propinsi

Undang-undang No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Sekcab / UU No. 199

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1957
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN-TENGAH
DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN
BARAT, KALIMANTAN-SELATAN DAN KALIMANTAN-TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Undang-undang No.25 tahun 1956 didalam penjelasannya telah menentukan pembentukan daerah Swatantra Propinsi yang ke-empat di Kalimantan yaitu Propinsi Kalimantan Tengah yang akan meliputi Kabupaten-Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin selambat-lambatnya tiga tahun sesudah berlakunya Undang-undang No.25 tahun 1956 tersebut diatas;
- b. bahwa dianggap kini telah tiba saatnya untuk membentuk daerah Swatantra Propinsi yang dimaksud;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pembentukan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah itu perlu dilalukan dengan Undang-undang Darurat;
- Mengingat: 1. pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
2. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (L.N. No.6/1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Darurat No.6 tahun 1957 (L.N. No.9/1957);
3. Undang-undang No. 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur (L.N. No.65/1956);
- Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 29 April 1957;

M E M U T U S K A N :

- I. Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN-TENGAH, yang juga
- II. Mengubah : Undang-undang No.25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur.

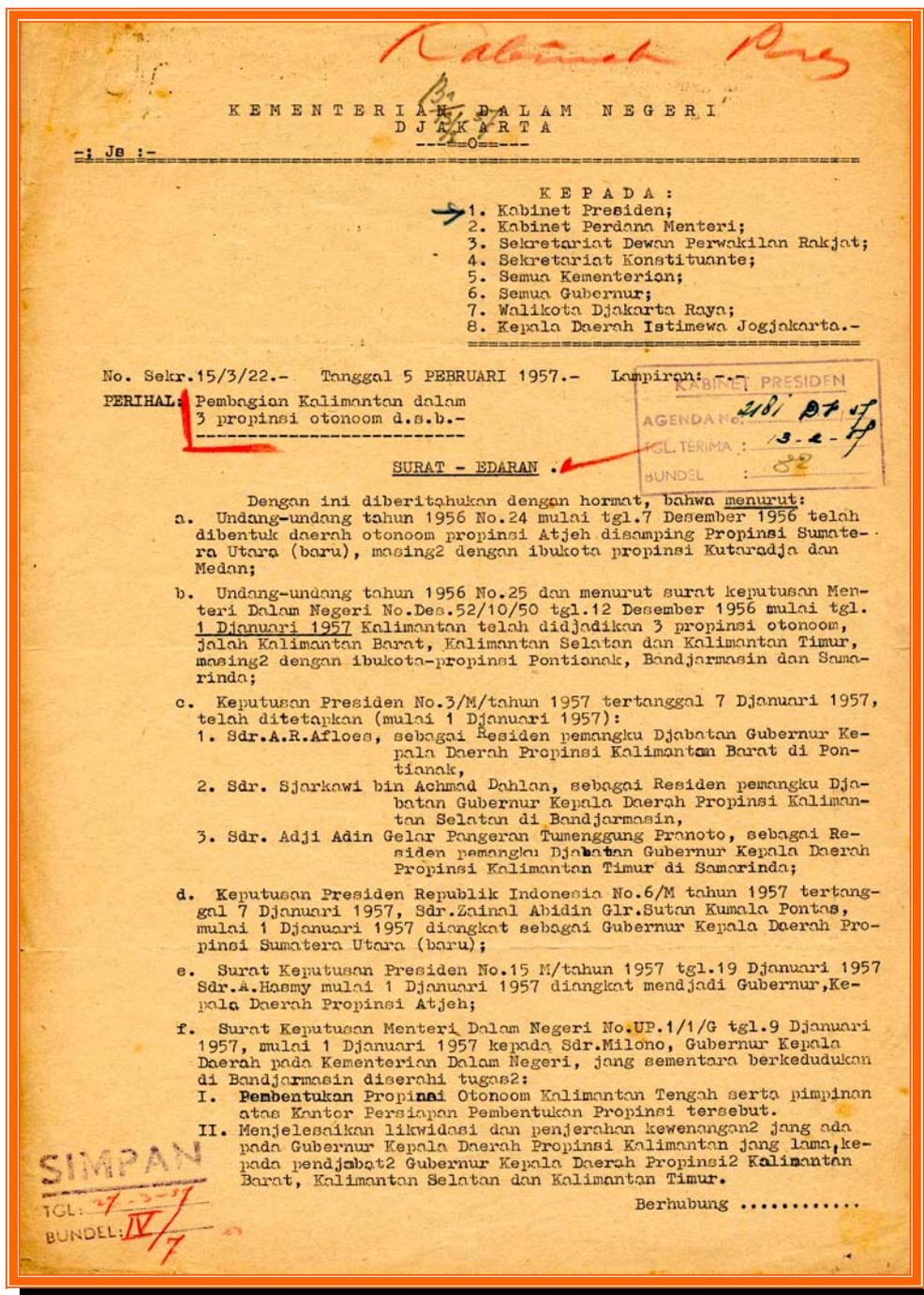
Pasal 1.

- (1) Daerah-daerah Swatantra Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin tersebut dalam pasal 1 ad I No. 4, 5 dan 6 Undang-undang Darurat No.3 tahun 1953 (L.N. No.9/1953), dipisahkan dari lingkungan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan-Selatan termaksud dalam pasal 1 No.2 Undang-undang No.25 tahun 1956.
- (2) Daerah yang wilayahnya meliputi ketiga Kabupaten tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibentuk menjadi daerah Swatantra tingkat ke-I dengan nama "Propinsi Kalimantan-Tengah".
- (3) Pasal 1 No.2 Undang-undang No.25 tahun 1956 diubah sehingga berbunyi:
- "2. Propinsi Kalimantan-Selatan, yang wilayahnya meliputi daerah-daerah otonom Kabupaten Bandjar, Hulu Sungai-Selatan, Hulu Sungai-Utara, Kotabaru dan Kota-Besar Bandjar-masin, tersebut dalam pasal 1 Ad I No. 1 s/d 3, 7 dan 8 "Undang-undang Darurat tersebut ad 1 diatas;".

Pasal 2.

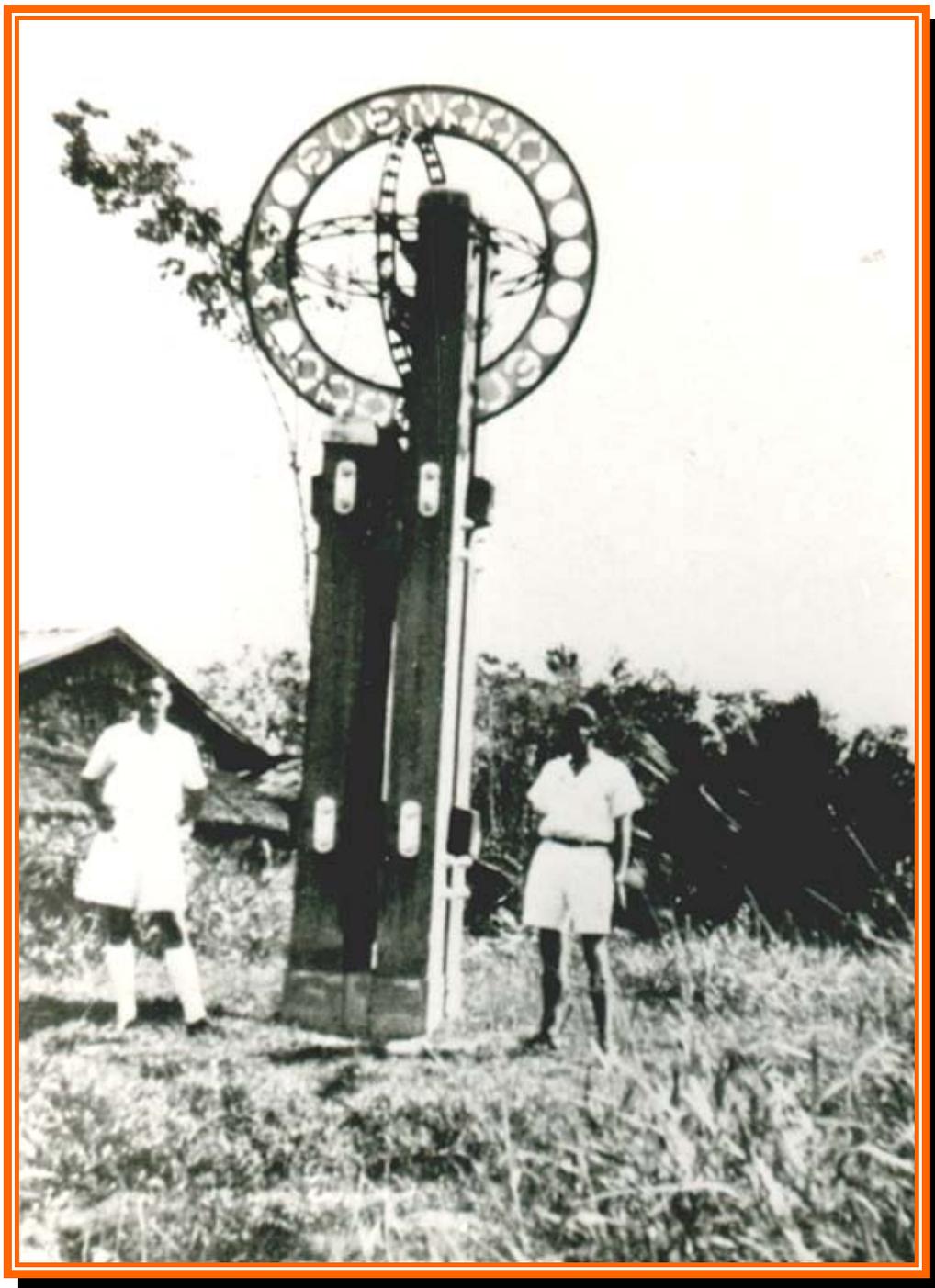
Undang-undang No. 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan perubahan UU No.25 tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Sekcab / UU Darurat No. 145



Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 1957 tentang pembagian Kalimantan dalam 3 provinsi otonom yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dengan berdasar Keputusan Presiden No.3/M/Tahun 1957, 7 Januari 1957.

Kabinet Presiden RI No. 901



Tugu Katulistiwa di Pontianak
KIT No.0300/078

KUNJUNGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Presiden Soekarno disambut oleh Panglima TT VI Kol. Sadikin dan Gubernur Milono, waktu tiba di Lapangan Udara Pontianak
Kempen No. 551208 kk 32



Suasana dalam rapat raksasa di Pontianak, Presiden Soekarno sedang memberi wejangan

Kempen No.551208 kk 22

BEKUM DIKOREKSI

PIDATO P.J.M. PRESIDEN PADA RAPAT RAKSASA DI SAMPIT,
TANGGAL 9 SEPTEMBER 1959.

Saudara-Saudara, saya saja berpidato lebih dulu saja bertanja, tjoba ja, naik tangan. Siapa jang Kristen, naik tangan. Siapa beragama Kristen naik tangan. Siapa jang beragama Islam, naik tangan. Maka oleh karena ke-
njakan Saudara-Saudara beragama Islam, saya menjampaikan ~~lebih dahulu~~ salam Islam Assalamualaikum warachmatullahi wabarokatuh (Rakjat mendjawab Red). Kurang keras. Assalamualaikum warachmatulahi wabarokatuh. /

Kita sebagai warganegara Republik Indonesia jang semuanya berlindung dibawah kibaran sang Merah Putih, beragama apa pun, semuanya kita adalah warga negara Republik Indonesia. Mari kita memekikkan ~~pele Mondaka~~ dengan suara jang gegap gempita. Merdeka! / Kemudian salam Nasional kita.

Saudara-Saudara, sebagai dikatakan oleh Bapak Tjilik Riwut, pada tanggal 9 bulan 9 djam 9, Bapak telah mendarat di Sampit. Bapak Tjilik Riwut mengatakan bahwa oleh karena itu maka angka 9 itu bagi rakjat Sampit adalah angka jang keramat. Sebenarnya bukan karena itu, sebab ~~saja ini bukan wabi~~, bukan Mo' alaikat, saja adalah manusia biasa. Saudara makan nasi, saja makan nasi. Saudara sahadjat, sajumpun sahadjat. Saudara adalah manusia biasa, saja adalah manusia biasa. Tjuma, sodjak proklamasi 17 Agustus 1945 saja ini oleh rakjat Indonesia diserahi pekerdjaan mendjadi Presiden Republik Indonesia, dan jang Saudara sambut dengan hebat tadi itu dan sekarang pula, bukan manusia jang bernama Sukarno, bukan manusia jang bernama Bung Karno atau Pak Karno, tetapi Presiden Republik Indonesia. Dan Saudara-Saudara menjambut Presiden Republik Indonesia dengan gembira oleh karena Saudara merasa mempunjai Republik. Ja, tiap-tiap republik mempunjai Kepala Negara. Didalam Undang-undang Dasar kita ditulis bahwa tiap-tiap warga negara bisa dipilih mendjadi Kepala Negara. Ja sekarang ketetulan bernama Sukarno. Siapa tau nanti kalau Bung Karno berhenti mendjadi Presiden lantas diadakan pemilihan, lantas kalau Bung Karno tidak mendjadi Presiden lagi, -Ja mungkin, mungkin karena Presiden mati, tiap-tiap manusia jang hidup terus. Pada eatu ketika, tiap-tiap manusia mati. Kemudian Presiden Republik Indonesia jang bernama Sukarno sekarang ini harus diganti. Nanti, siapa tahu jang djadi gantinya Saudara! atau Saudara.

Tadi saja katakan, meskipun Presiden Republik Indonesia bukan Sukarno, bukan Bung Karno, bukan Pak Karno, meskipun Presiden Republik Indonesia itu bernama Abdullah, atau Zainudin atau Abdul Karim atau Abdul Hanman, atau

Djulaiha,

Pidato PJM Presiden Soekarno pada rapat raksasa di Sampit,
9 September 1959.

Pidato Presiden No. 115 A



Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah memeriksa barisan kehormatan waktu tiba di Lapangan Udara Pontianak
Kempen No.550628 kk 1



Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah meletakkan karangan bunga waktu berkunjung ke Taman Pahlawan di Pontianak
Kempen No.550628 kk18



Sambutan murid-murid sekolah waktu rombongan Wakil Presiden
Mohammad Hatta tiba di Singkawang
Kempen No.550629 kk 18



Wakil Presiden Mohammad Hatta disambut oleh para penyambut waktu tiba di Sungai Pinggan (foto tanggal 1 Juli 1955)

Kempen No.550701 kk3

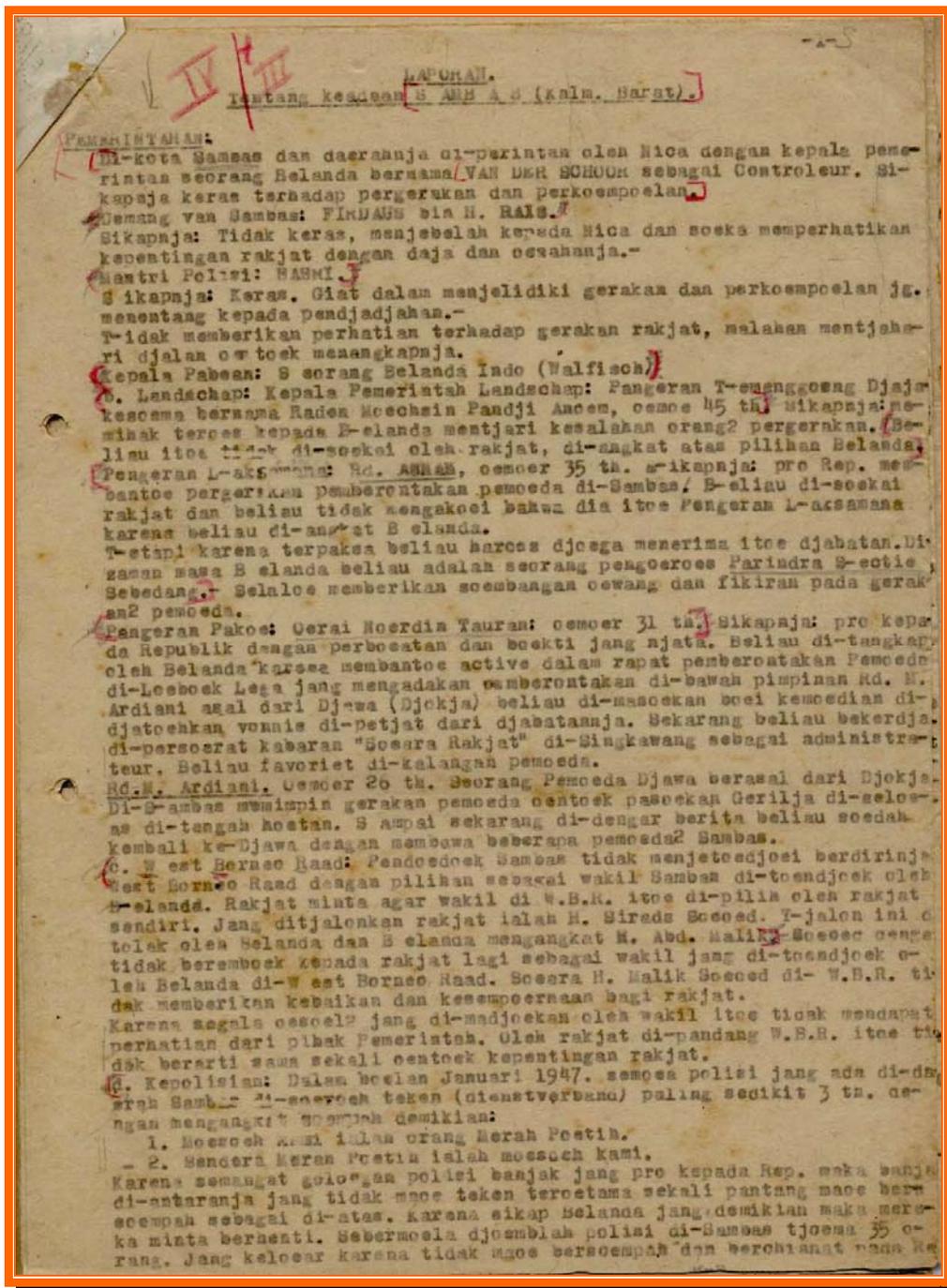


Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah meninjau perumahan di
Perkampungan CTN di Sanggau
Kempen No.k 550701 kk 3- 6



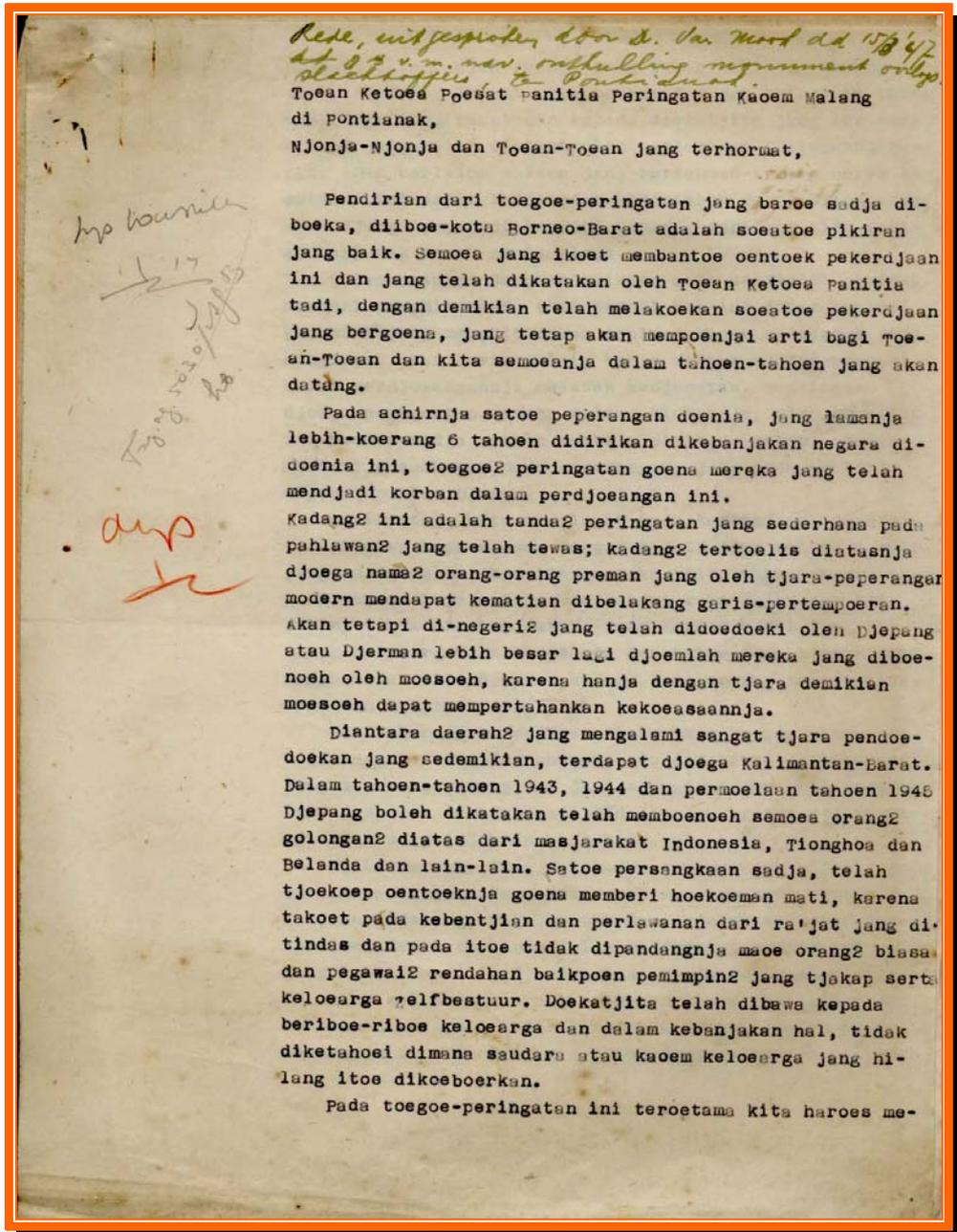
Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama rombongannya
disambut oleh penduduk waktu tiba di Sekadan
Kempen No.550702 kk 1

PERJUANGAN KEMERDEKAAN



Laporan dari Markas Besar Tentara Staf Umum tentang keadaan perlawanan rakyat Kalimantan Barat melawan Belanda di daerah Pemangkat, Mempawah, sekitar Kota Singkawang dan Bengkayang sekitar 1947.

[Kementerian Pertahanan No. 1289](#)

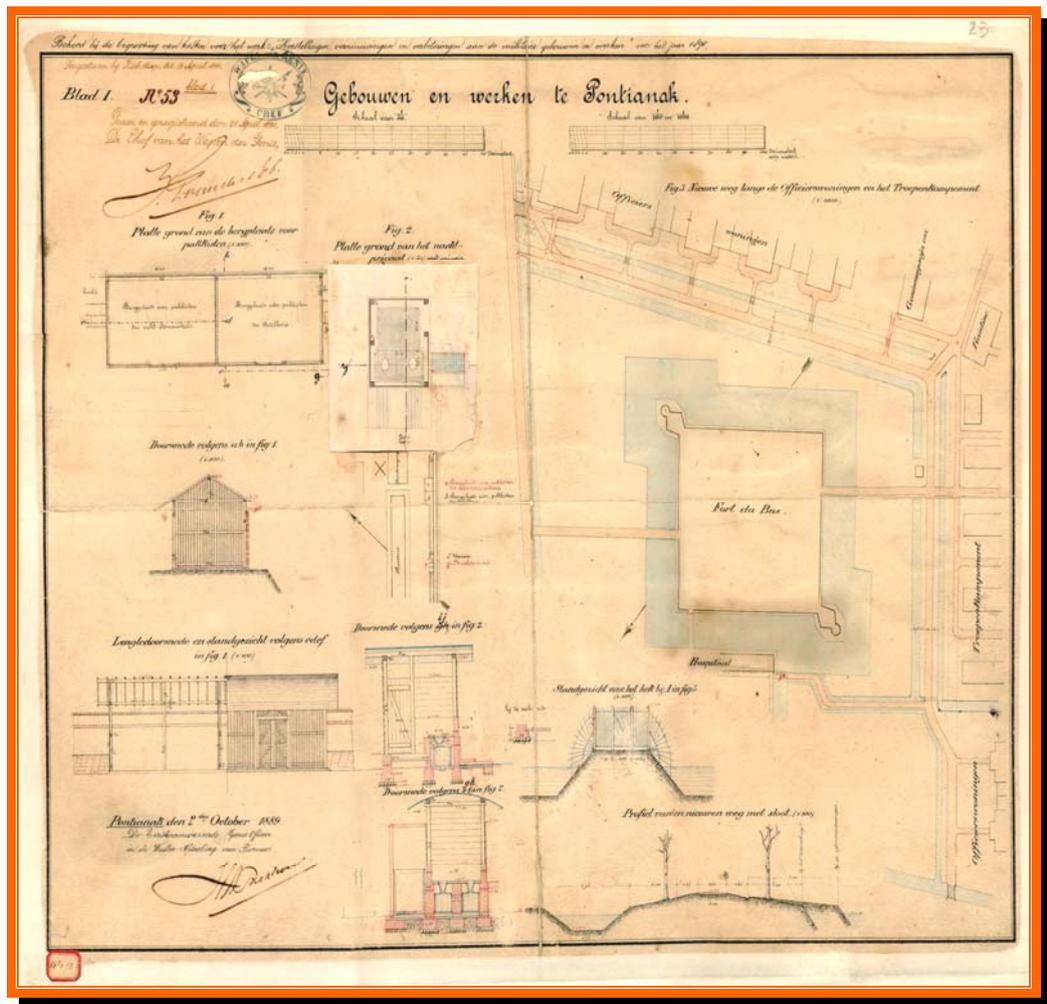


Berkas tentang peresmian tugu peringatan korban penduduk Kalimantan Barat selama penjajah Jepang sekitar tahun 1947.
Algemeene Secretarie No. 1309



Gubernur Milono sedang meletakkan karangan bunga di Tugu Pahlawan di Pontianak
Kempen No.550628 kk 19

PEMBANGUNAN

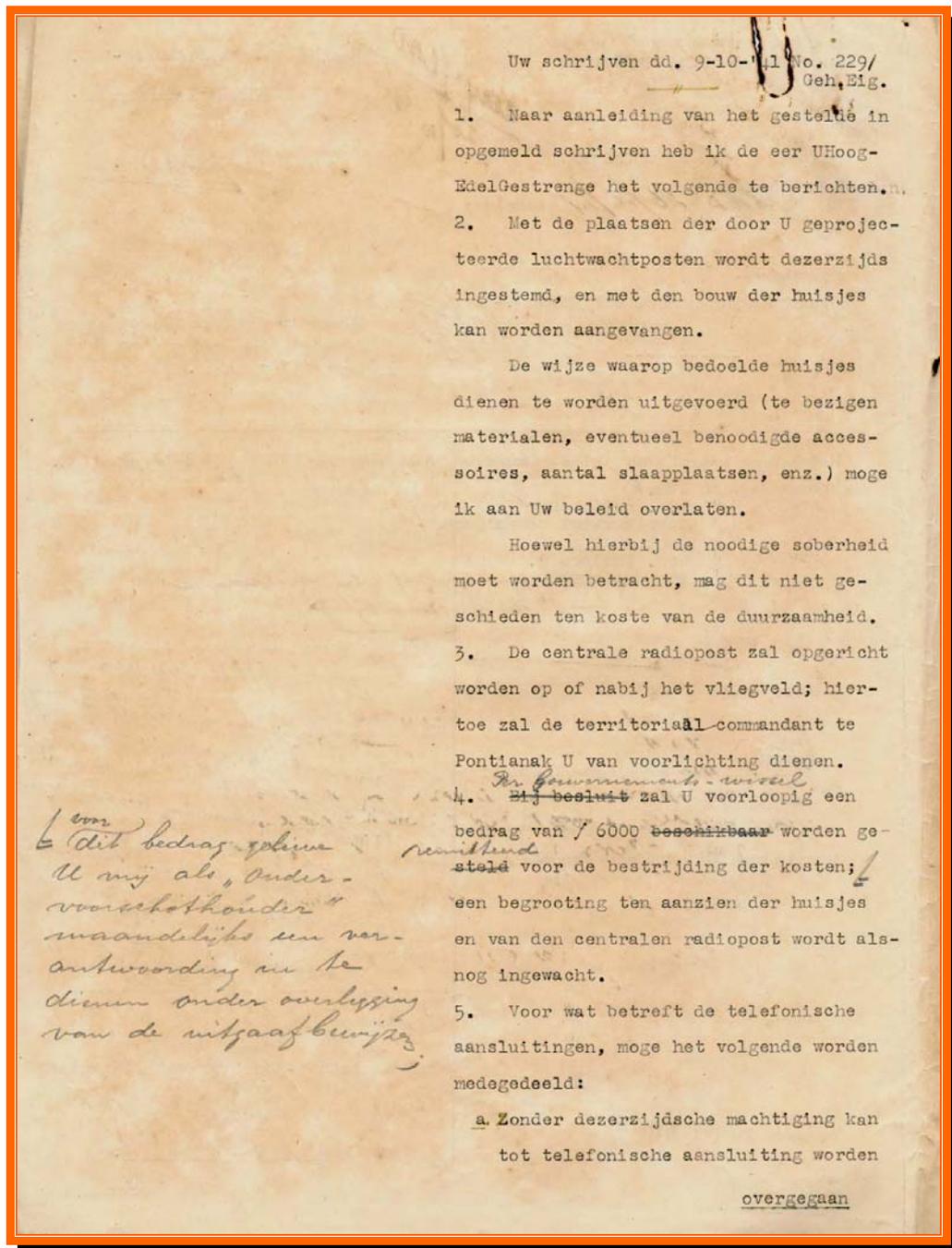


Gebouwen en Werken te Pontianak , 2 Oktober 1889.
 (Gambar pekerjaan dan bangunan di Pontianak)
[Koleksi Peta Blad 1/53](#)

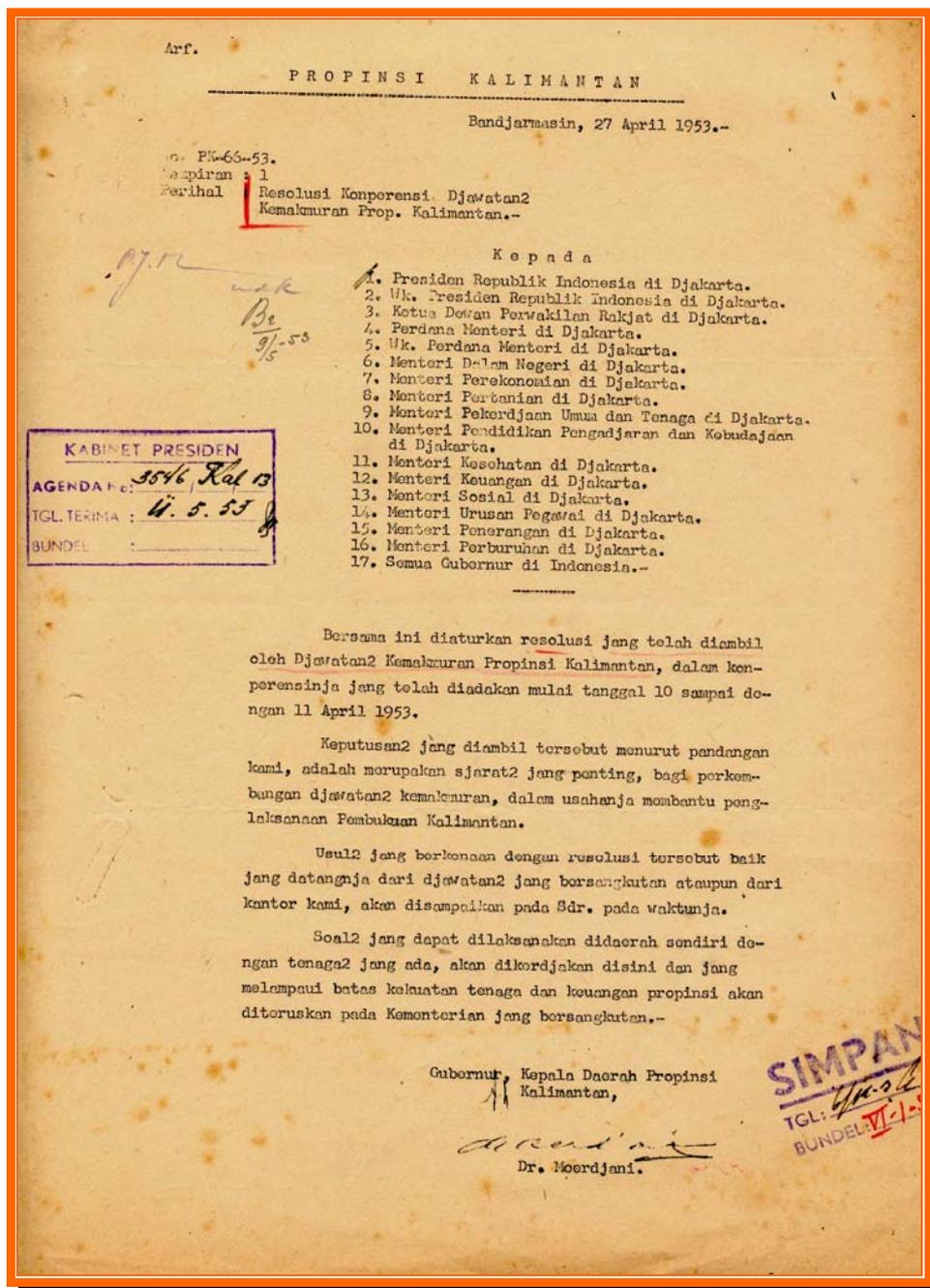


Berkas tentang proyek pembangunan lapangan terbang di Singkawang tahun 1938.

BOW : BL.213



Oprichting van een luchtwachtgebouw in Singkawang
(pembangunan ruang tunggu pesawat di Singkawang), 1941.
BB No.4126



Resolusi berasal dari seluruh Peserta Konferensi Kilat Jawatan-jawatan Kemakmuran Provinsi Kalimantan yang diadakan di Banjarmasin 10 - 11 April 1953 tentang syarat- syarat penting bagi perkembangan Jawatan Kemakmuran dalam usaha membantu pelaksanaan pembukaan Kalimantan. 11 April 1953
Kabinet Presiden No. 613

PRASARAN PADA SEMINAR DAN LOKAKARYA PELITA II
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT, YANG
DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN
10 NOPEMBER 1973, DI PONTIANAK

Dengan gembira saya penuhi permintaan Saudara Gubernur Kalimantan Barat untuk memberikan prasaran pada Seminar dan Lokakarya PELITA II Daerah ini. Penyusunan PELITA II yang realistik dengan sasaran-sasaran yang tepat, baik dalam ruang lingkup nasional maupun ruang lingkup daerah, akan sangat menentukan perbaikan tingkat kehidupan rakyat dan gerak laju pembangunan dalam tahap-tahap yang akan datang.

Dalam menyusun rencana pembangunan hendaknya kita mengambil sikap pokok yang realistik tanpa kehilangan idealisme. Realistik artinya, bahwa rencana pembangunan itu bertolak dari strategi dan penentuan sasaran yang sepadan dengan kemampuan yang dapat dikembangkan di masa depan dan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh rakyat banyak. Dengan perkataan lain, rencana pembangunan itu secara teknis harus dapat dilaksanakan. Tidak ada gunanya disusun rencana pembangunan yang muluk-muluk, yang terang nanti tidak akan dapat dilaksanakan. Selain membuang-buang tenaga, uang, fikiran dan waktu, rencana pembangunan yang tidak akan mencapai sasarnya akan dapat mengecewakan rakyat. Kekecewaan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Padahal, kepercayaan pada kemampuan diri sendiri merupakan modal yang sangat penting bagi berhasilnya pembangunan. Dalam bersikap realistik itu, maka idealisme juga jangan diabaikan, ialah cita-cita jangka panjang terbinanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sangat lah terang bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu baru akan dapat kita letakkan landasannya setelah kita melaksanakan serangkaian REPELITA yang bertahap-tahap dan sambung menyambung.

Mungkin

Prasaran yang disampaikan oleh Asisten Pribadi Presiden Sudjono Humardani pada Seminar dan Lokakarya Pelita II daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Nopember 1973 di Pontianak.

Marzuki Arifin No. 594

EKONOMI

Reknopt overzicht van den Handel en de scheepvaart te Pontianak gedurende het jaar 1846.

De gehele invoer te Pontianak heeft bedragen:

aan koopmanschappen	768686	30
specien	267865	05
Totaal	1036551	35

De invoer heeft bestaan in voortbrengselen:

van Europa en Amerika	194895	10
de west van Indië en Bengalen	98283	"
China, Malakka en Siam	127579	"
en den Batavischen Archipel	351126	20
Totaal	771883	30

De invoer heeft plaats gehad van de volgende landen, e. l.:

van Javaansche eilanden	290956	110
den Oosterschen archipel	29075	"
Celebes	15162	"
China	83475	"
Singapoera	37007	20
Totaal	768686	30

De voortbrengselen van Europa en Amerika hebben hoofdzakelyk bestaan in de volgende:

Aandewerk	2700	00
Garenen	7694	"
Glaswerk	2705	30
Totaal	13100	30

Transporten 14499 80

Ringkasan tentang perdagangan dan pelayaran di Pontianak tahun 1846.

[Borneo West No. 98](#)

AGRARISCHE REGELINGEN
in het
Zelfbestuursgebied der
residentie WESTERAFDEELING VAN BORNEO.

12.31/54
19

--0--

1. Administratieve indeeling van
het gewest.

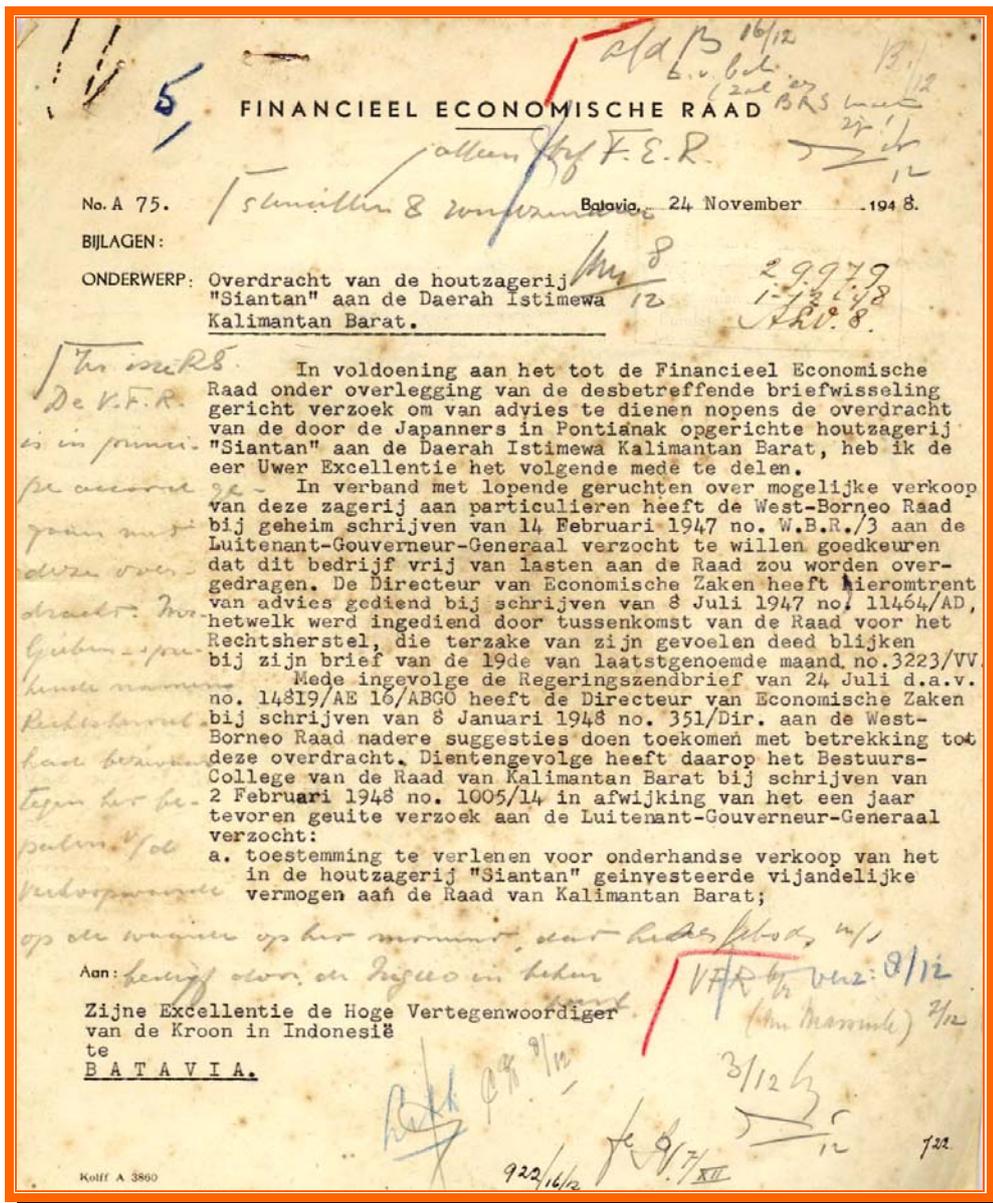
De residentie Westerafdeeling van
Borneo is administratief verdeeld in vier
afdeelingen :

Pontianak
Singkawang
Ketapang en
Sintang.

Laatstgenoemde afdeeling bestaat,
behalve uit het landschap Sintang, omvatten-
de de onderafdeelingen Sintang en Melawi,
geheel uit rechtstreeks bestuurd gebied,
terwijl verder het voormalige landschap
Meliau in de onderafdeeling Sanggau, afdee-
ling Pontianak eveneens bij het Gouverne-
mentsgrondgebied is ingelijfd. Overigens
wordt het grondgebied dezer residentie
ingenomen door zelfbesturende landschappen.
Deze landschappen zijn gelaten in het genot
van eene zekere mate van zelfstandigheid,
welke mate door den inhoud van het met het
Gouvernement gesloten politiek contract
wordt bepaald.

De Landschappen onder korte verklaring
zijn, behalve het reeds genoemde Sintang,
gelegen in de afdeeling van dien naam :
in de onderafdeelingen Pontianak en Sekadau
der afdeeling Pontianak:
de landschappen Koeboe en Sekadau, en in
de

Peraturan mengenai agraria di Borneo West, 1919.
[BB No. 1113](#)



Berkas mengenai penyerahan penggergajian kayu "Siantan" kepada D.I. Kalimantan Barat, 24 Nopember 1948.
[Algemeene Secretarie No.862](#)



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN R I

No. : B-450/Wk.Pres/Set/VI/82.
Lampiran:
Perihal : Minta pandangan.

Jakarta, 12 Juni 1982.

Kepada Yth.

Sdr. H a s a n
P.T. Panca Usaha Trading & Coy
PS. Ikan Lama No. 43
Pemangkat
di -

KALIMANTAN BARAT.

Surat Saudara No. 327/11/Pmk, tanggal 1 Juni 1982, perihal tersebut di atas telah diterima Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dengan baik.

Dengan ini kami sarankan agar proposal Saudara diajukan langsung ke instansi-instansi yang berwenang.

Demikian untuk dimaklumi,-

a.n. SEKRETARIS WAKIL PRESIDEN R.I.

ASISTEN WAKIL PRESIDEN
URUSAN EKUIN,



Julian Dharman
Julian Dharman.

Proposal dari PT. Panca Usaha Trading & Coy P.S Ikan Lama tentang proyek Pertanian Pembudidayaan tanaman ubi kayu Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Dati II Sambas. 1 Juni 1982.
Adam Malik No. 569



Kantor Oost Borneo Handel Maatschapij di Singkawang
KIT No. 0783/013



Pasar malam di Pontianak
Kempen No.516816



Toko Cina di tepi hutan
KIT No. 0300/022



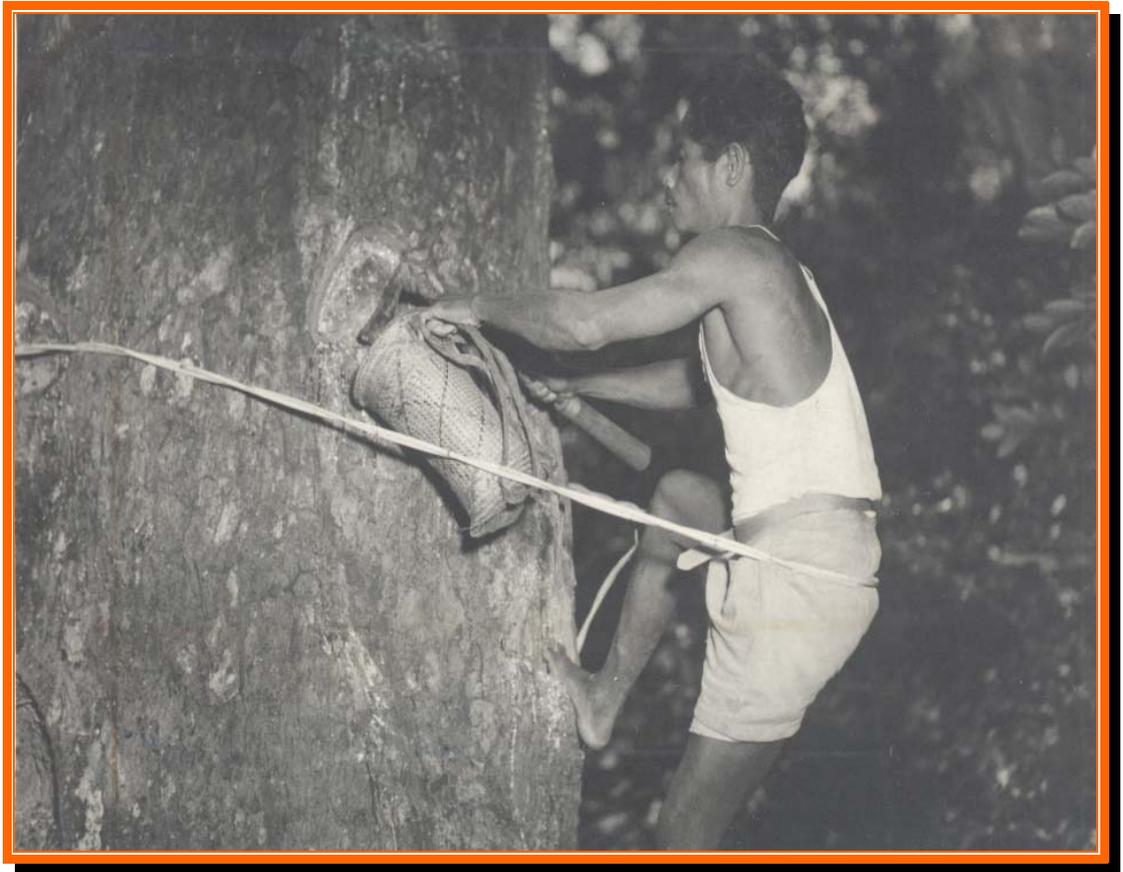
Pasar Karet di Pringin
KIT No.0639/053



Pelabuhan minyak Pontianak
KIT No.0761/026



Gedung Yayasan kopra di Pontianak
Kempen No. k 550628 kk 4-1



Pengambilan getah dari pohon damar di Nangatayap
Kempen No. 510917 kk 2



Pengambilan rotan di Kampung sebuah Kecamatan Nangatayap
Kempen No.510919 kk 10



Penggergajian kayu besi oleh Suku Dayak diseluruh Kecamatan Nangtanyap, Ketapang (foto 17 September 1951)
Kempen No.510915 kk 5



Kompleks pertokoan di Singkawang Kalimantan Barat
KIT No.0831/063



Kapal "Kantoel" melayari Sungai Kapuas
KIT No. 0125/081



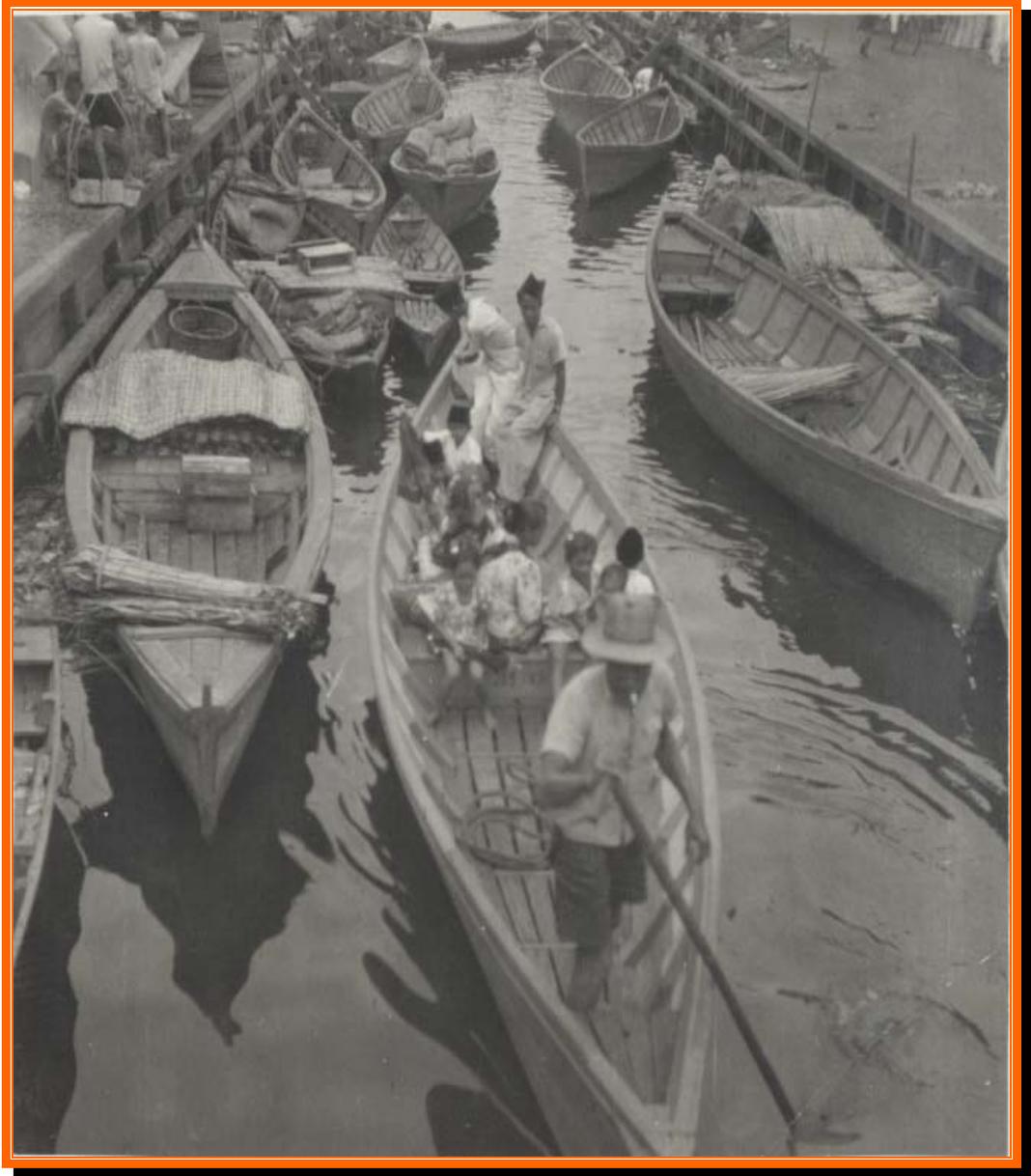
Pemandangan penjual durian dalam kota Pontianak
Kempen No.516810



Pemandangan stasiun bus Kota Pontianak
Kempen No. 516814



Pemandangan kota Pontianak dengan sampan-sampan di depan rumah
Kempen No.516819



Perahu-perahu untuk alat pengangkutan sungai di Pontianak
Kempen No.516829



Rotan hasil rakyat Kampung Melayu, Ketapang
Kempen No.510919 kk20



Pembuatan jaring udang oleh penduduk Sukadana Kabupaten
Ketapang
Kempen No.510905 kk4



Hasil-hasil penangkapan ikan oleh rakyat di Ketapang
Kempen No.510821 kk27



Ikan Belida hasil rakyat di Kampung Sebrang Ketapang
Kempen No.510919 kk6

PENDIDIKAN



Gedung sekolah Tionghoa di Pontianak, 23 Agustus 1951
Kempen No. 510823 kk 39



Pemandangan dalam kelas di salah satu Madrasah, Sungai Besar
Kalimantan Barat
Kempen No.510905 kk 14



Gedung Sekolah Madrasah di Sungai Besar, Ketapang
Kempen No.510917 kk 11

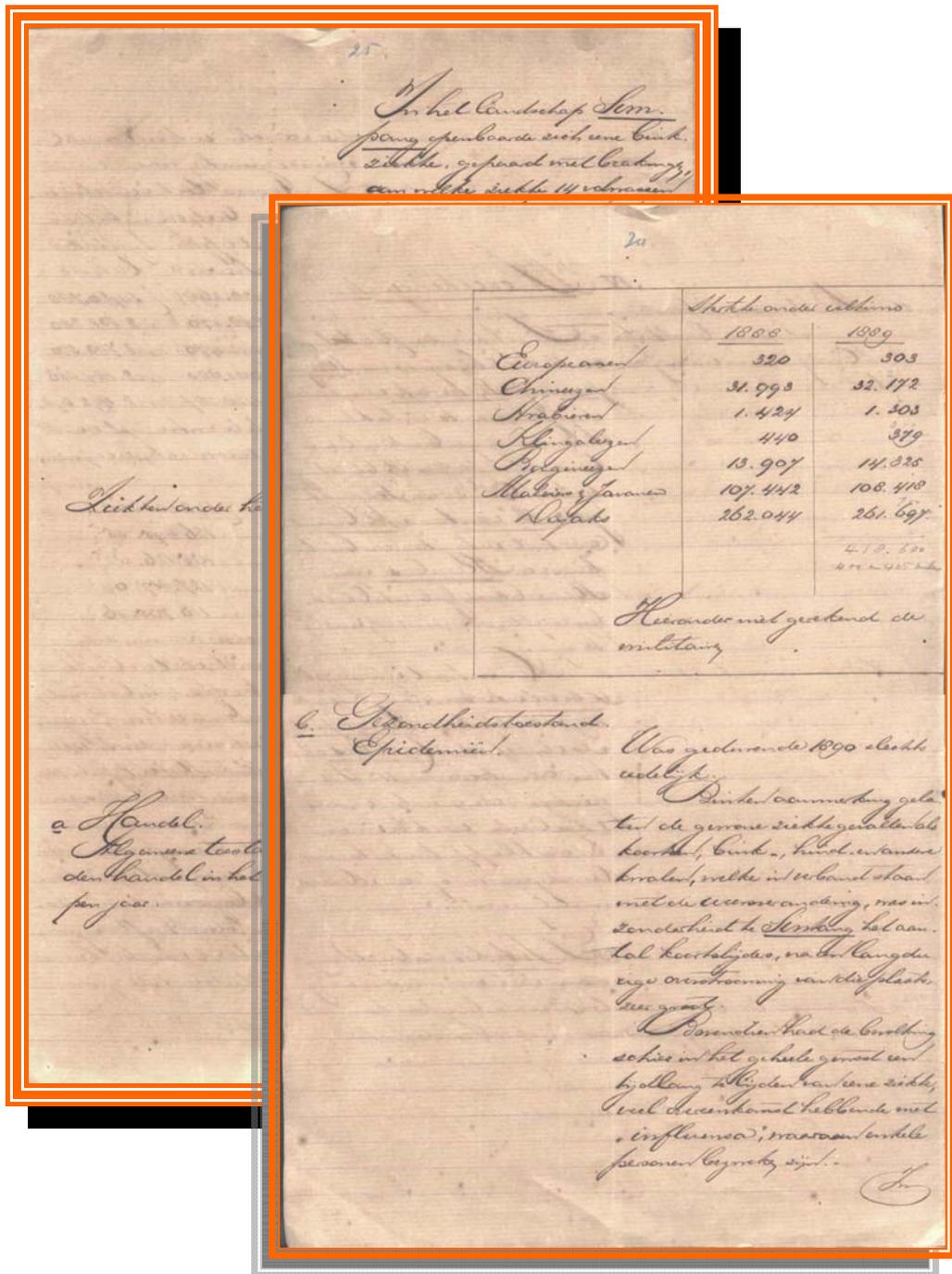
DATA MI, SD DAN PENILIK
DALAM RANGKA LOMBA PENINGKATAN MUTU SD DAN MI
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT.....

NO	KABUPATEN/KODYA	KECAMATAN	MI			SD			JUMLAH (6 + 9)	PENILIK			KET
			NEGERI	SWASTA	JUMLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH		PAI	TK/SD	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pinjahan		3	95	98	933	53	986	1.084	14	51	65	
		Keupawah Hilir	-	9	9	46	1	47	56	1	2	3	
		Sel. Kuyit	-	3	3	21	1	22	25	1	1	2	
3.	Kabupaten Suluw	Roban	-	-	-	20	2	22	22	1		1	
		Paikran	-	1	1	18	8	26	27	1	2	3	
		Tajuh Belas	-	2	2	37	5	42	44	1		1	
		Salaku	-	-	-	27	1	28	28	1	1	2	
		Peangkat	1	12	13	51	5	56	69	1	3	4	
		Jawai	-	6	6	43	-	43	49	1	1	2	
		Tebas	-	12	12	59	3	62	74	1	3	4	
		Sambas	-	3	3	60	3	63	66	1	3	4	
		Sejangkung	-	2	2	31	-	31	33	1	1	2	
		Teluk Keramat	-	8	8	74	1	75	83	1	3	4	
		Paloh	-	3	3	17	-	17	20	1	1	2	
		Sel. Raya	-	4	4	37	-	37	41	1	2	3	
		Saplantan	-	1	1	11	1	12	16	1	2	3	
		Bengkayang	-	-	-	37	1	38	38	1	1	2	
		Leke	-	-	-	27	-	27	27	-	-	-	
		Sanggau Lede	-	1	1	32	-	32	33	-	-	-	
		Selusa	-	-	-	23	-	23	23	-	1	1	
	JUMLAH		4	162	166	1.637	85	1.722	1.888	30	79	109	

bermabung

Data tentang Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar dan Penilik dalam rangka lomba peningkatan mutu sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat, 14 Juli 1995
Departemen Agama No. 214

KESEHATAN



Laporan umum dari Residen Borneo Barat kepada Alegemeene Secretarie tentang keadaan kesehatan penduduk di Kalimantan Barat tahun 1890.
[Borneo West No.37](#)



Komplek Rumah Sakit di Sambas
KIT No. 0300/020

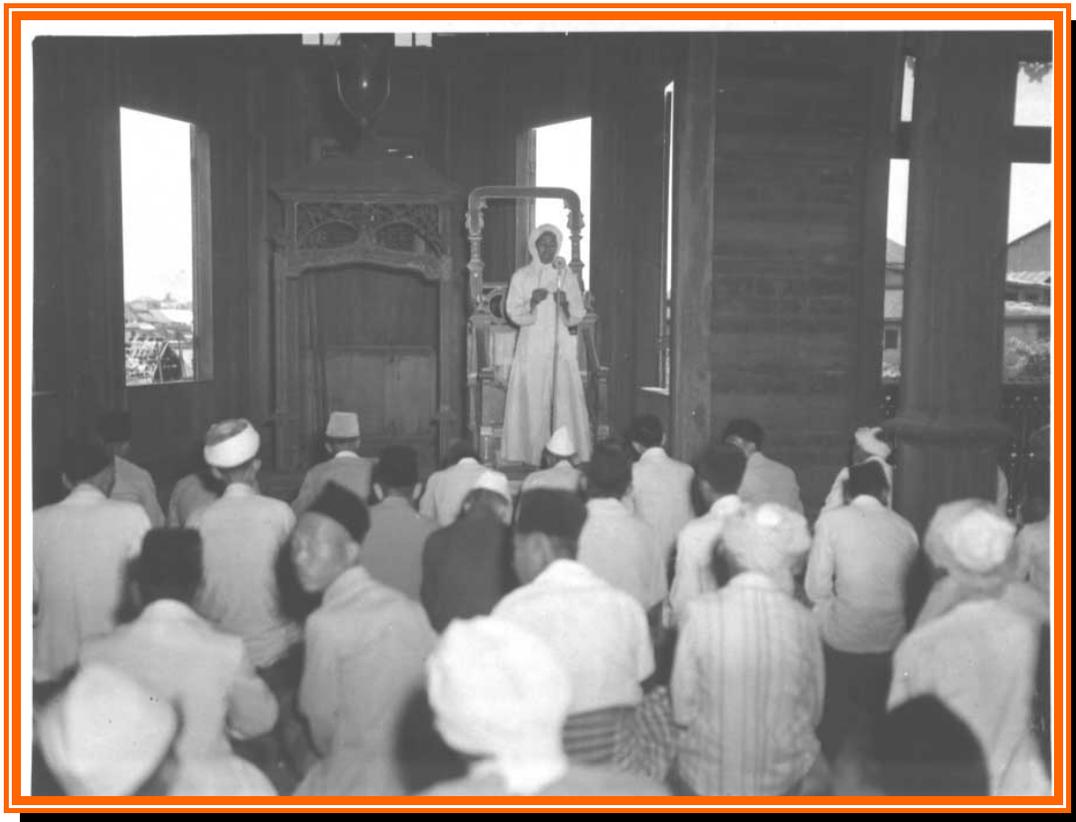


Palang Merah Remaja berbaris di Kota Baru
KIT No.0336/036

PERIBADATAN



Lalu lintas di sungai terlihat beberapa sampan memuat muslim-muslim yang akan pergi ke masjid
Kempen No. 516886



Pembacaan khotbah di Masjid Pontianak
Kempen No.516893



Bentuk masjid di Sunday, Ketapang
Kempen No.510919 kk1

PEMUKIMAN



Pemukiman kampung Dayak
KIT. No. 0831/044



Pemukiman kampung Melayu di Pontianak
KIT No.0761/014



Rumah pesanggrahan orang Dayak
KIT No. 0861/089



Rumah di tepi Sungai Kapuas Pontianak
Kempen No.516831



Rumah di atas perahu Pontianak
Kempen No.516843



Rumah-rumah penduduk di tepi Sungai Bawang di Pontianak
Kempen No.510821 kk18



Rumah kayu di daerah Pecinan Pontianak Kalimantan Barat.
KIT No.0761/017



Rumah nelayan semi permanen di Nangka Semangat,
Sungai Lekoyan Kalimantan Barat.

KIT No.0831/037



Rumah orang Dayak di kampung Merajuh, Sungai Landak
Kalimantan Barat
KIT No.0830/044



Pemukiman di tepi laut Pemangkat Kalimantan Barat
KIT No.0300/032

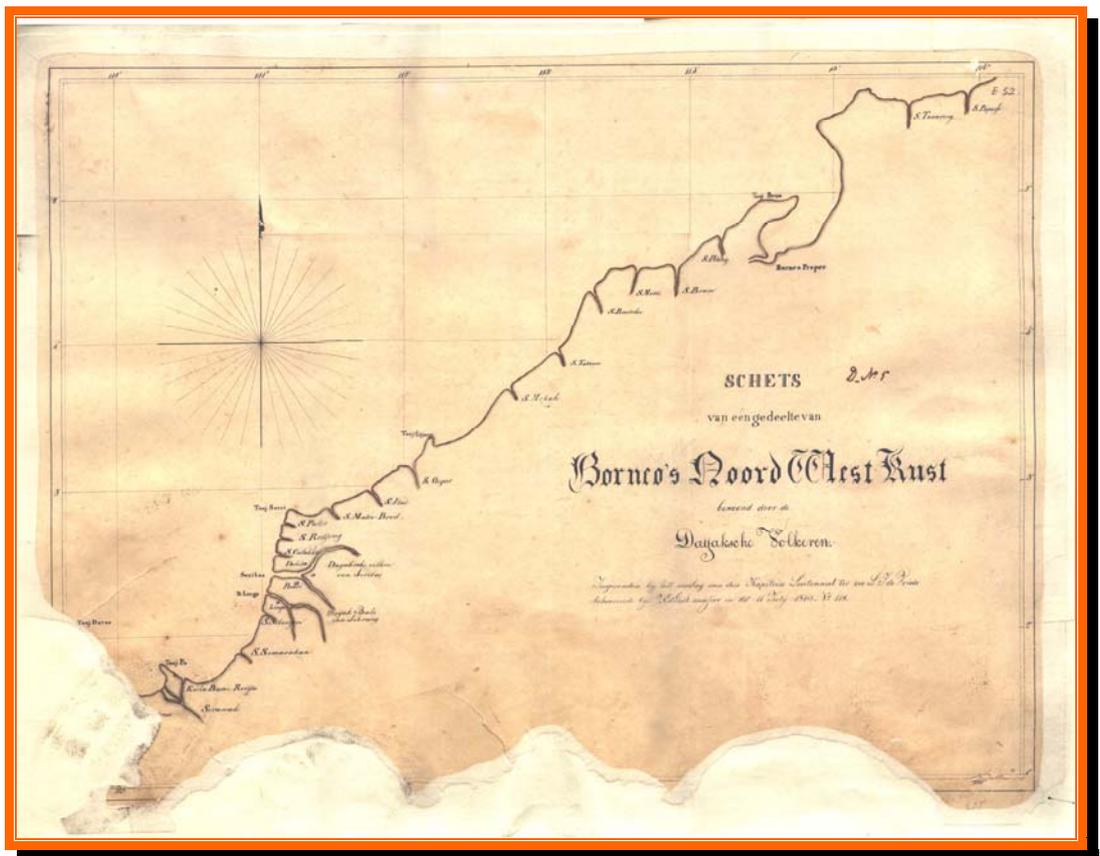


Pemandangan kota Pontianak
Kempen No.516809

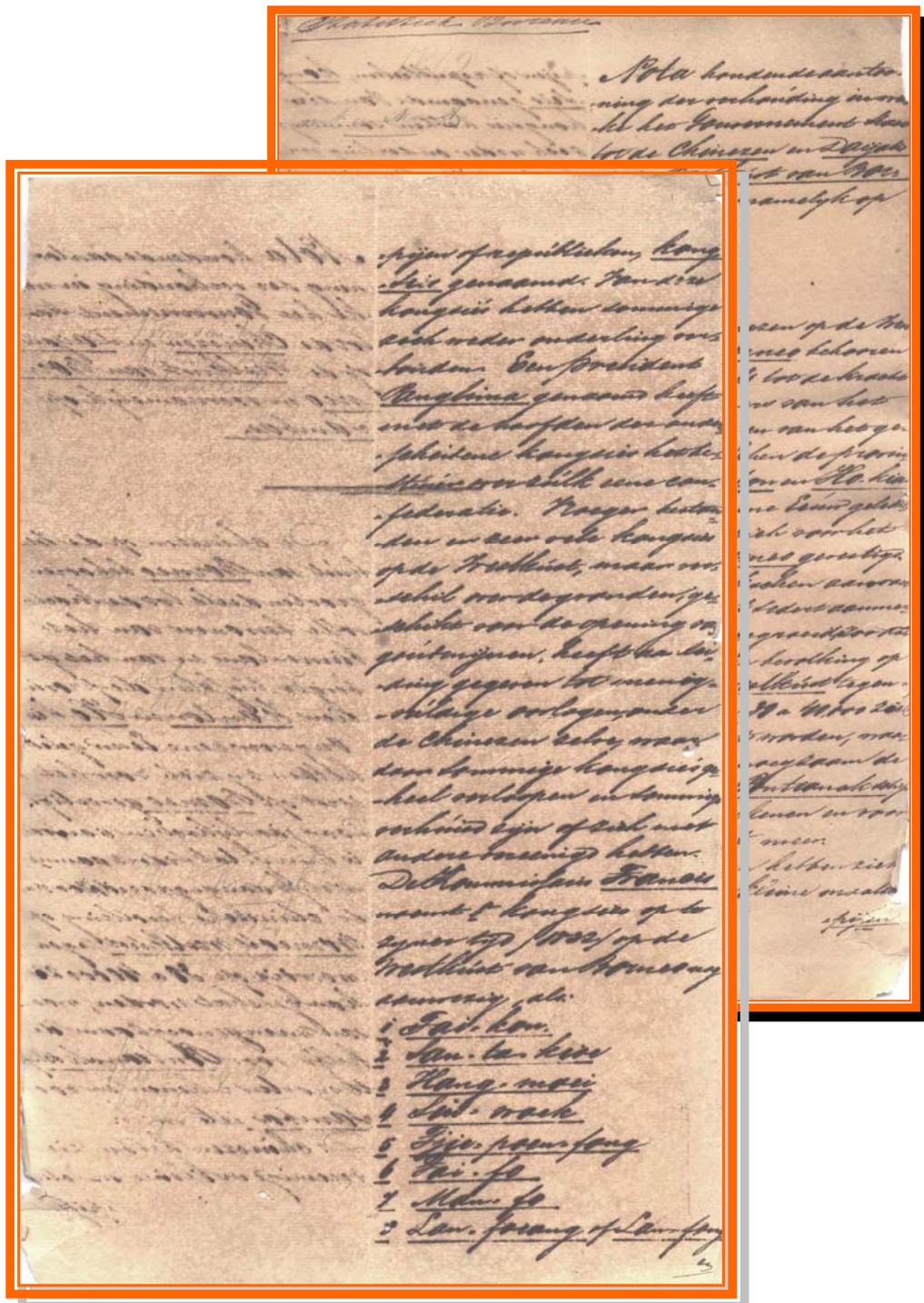


Rumah Residen Pontianak
KIT No.0761/016

ETNIS DAN BUDAYA



Land inhabited by Dayak People, 1840.
[Koleksi Peta F. De Haan No. E52](#)



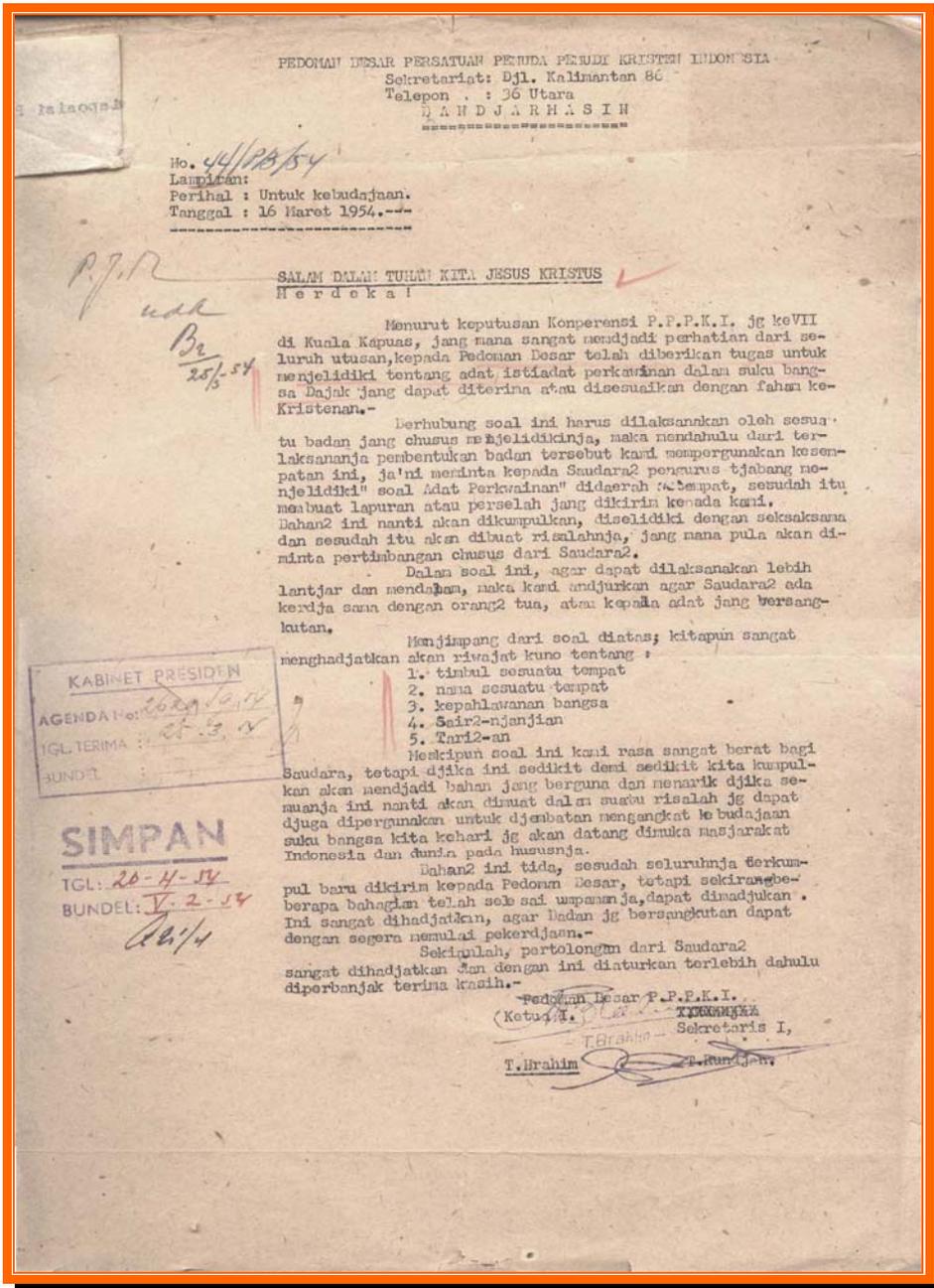
Nota hubungan antara orang China dan Dayak di Kalimantan Barat terutama di Sambas tahun 1892.
Borneo West 180



Pakaian asli Ketapang, Kalimantan Barat
Kempen No.510915 kk 1



Pakaian kombinasi pengaruh Islam dan Cina dalam upacara perkawinan di Ketapang
Kempen No. 510915 kk10



Surat dari Pedoman Besar PPPKI yang isinya tugas untuk menyelidiki adat istiadat perkawinan Suku Dayak. 16 Maret 1954
Kabinet Presiden No. 184



Upacara tujuh (7) bulan di Ketapang, Kalimantan Barat
Kempen No.510915 kk 7



Malam kesenian Satria Dayak, Pontianak
Kempen No.501466



Pencak Silat asli Ketapang, Kalimantan Barat
Kempen No.510915 kk 15



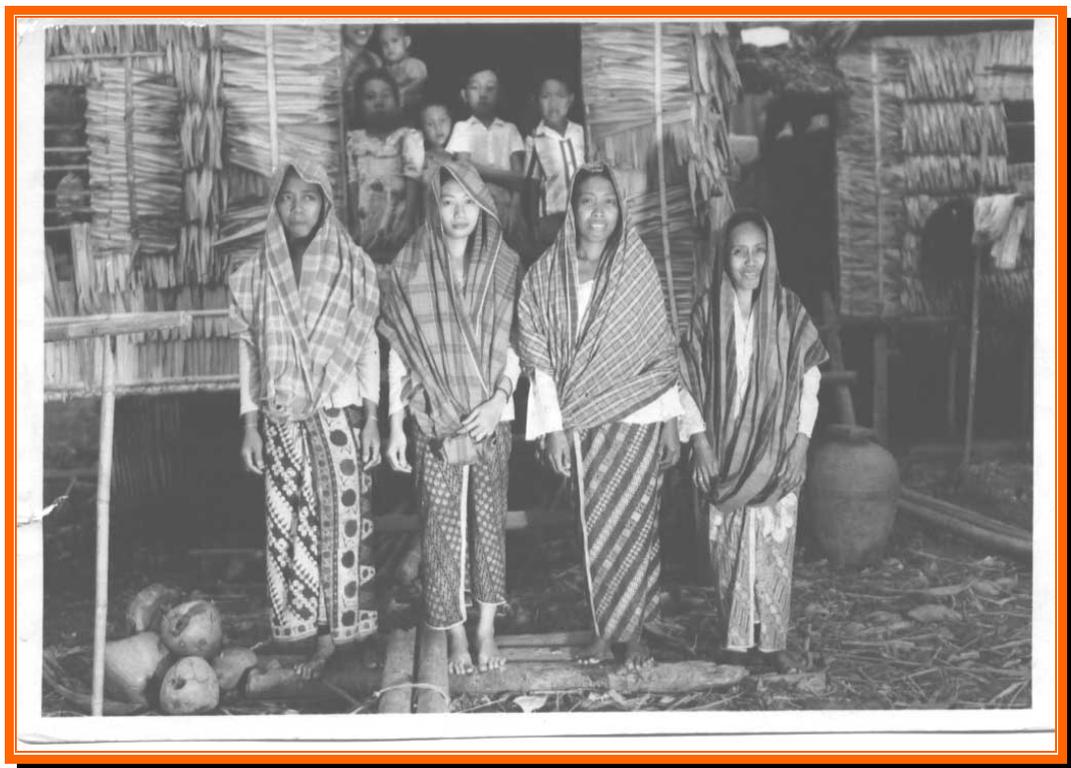
Tari Garunggang dari Suku Dayak di Nangtanyap
Kempen No.510918 kk 4



Peta persebaran Suku Dayak
KIT No.0984/053



Beberapa gadis Dayak dari Hulu Kapuas
KIT No.0442/020



Suku Bangsa Indonesia di Pontianak dan bentuk rumah di sana
Kempen No.510823 kk 18



Wanita penduduk Peniti, Pontianak
Kempen No.510905 kk 1



Wanita Suku Dayak Nangtanyap, Ketapang
Kempen No.510917 kk 12

PERAYAAN



Upacara bendera pada hari Proklamasi 17 Agustus 1951
di Pontianak
Kempen No.516864



Arak-arakan murid Sekolah Rakyat dalam perayaan
17 Agustus 1951 di Pontianak
Kempen No.516804



Arak-arakan dengan bendera dan semboyan-semboyan
di Pontianak
Kempen No.510909



Sepak bola antara kesebelasan Pontianak dan Singkawang
Kempen No.510919 kk 45

DAFTAR ARSIP KALIMANTAN BARAT YANG DISERAHKAN

DAFTAR ARSIP KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN

1. Eiland Borneo in 1691 (Pulau Kalimantan)
1 lembar
Koleksi Peta F. de Haan
No.B116
2. Catatan harian dari kepala pemerintahan di Kalimantan Barat sejak tanggal 1 Juli – 30 September 1825.
19 lembar
Borneo West no.86
3. Platte Grond van Mondrato, 1847. (Peta tanah daerah Mondrato)
1 lembar
Koleksi F de Haan No.E 30
4. Catatan Sejarah Borneo dari abad ke 19 disertai keadaan wilayah secara singkat tahun 1850.
18 lembar
Borneo West no.229
5. Topographische schets van Sambas met omliggend terrein (Peta topografi Sambas dengan daerah sekitarnya), 18 April 1851.
1 lembar
Koleksi Peta khusus no.11
6. Sketsa Rencana Pembangunan benteng Maboek dan sekitarnya di Montrada yang didanai dengan anggaran tahun 1856 dan 1857.
Koleksi Peta ANRI No.R.53

7. Noordelijk gedeelte van het Rijk Sambas en zijne grenze met Broenai (daerah sebelah utara Kerajaan Sambas dan daerah perbatasanya dengan Broenai), 1859.

1 lembar
Koleksi Peta F de Haan No.K 52

KESULTANAN PONTIANAK, MAMPAWAH DAN LANDAK

8. Akte van Investiture tusschen de compagnie en de Sulthan van Pontiana en Satango (akte mengenai peresmian pejabat diantara kompani dan sultan Pontianak dan Satango), 5 Juli 1779.

36 lembar
Borneo West No.252

9. Silsilah raja Pontianak mulai dari Sjarief Achmad bin Sultan Abdoel Rachman (Pangeran Bendahara) sampai dengan Sjariepah Zaida binti Achmad dan Sjariepah Zaharie binti Achmad.

1 lembar
Borneo West 225

10. Catatan tentang penggantian raja Pontianak tahun 1817 (dari Sultan Kassiem kepada Sultan Abdul Rachman)

8 lembar
Borneo West 193

11. Surat dari Sri Paduka Sultan Mohammad Alie Safioedien kepada Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 10 Mei 1823.

1 lembar
Koleksi Surat Emas No.39

12. Surat Sri Sultan Mohammad Zein Abidin dari Mampawah kepada Pemerintah Hindia Belanda mengenai keadaan keluarga Kesultanan, 17 Mei 1823.
1 lembar
Koleksi Surat Emas No.14
13. Catatan mengenai keadaan Mampawa antara lain penduduknya, pemerintahan, raja-raja dan sejarah asal mulanya. April 1838
12 lembar
Borneo West No.227
14. Surat dari Komissaris Inspektur Borneo dan Lingga kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda mengenai kontrak persahabatan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kalimantan Barat (Pontianak), 14 Agustus 1845.
7 lembar
Borneo West No.111
15. Penandatanganan peraturan mengenai pemungutan pajak di Kerajaan Koeboe Residensi Kalimantan Barat, 25 Agustus 1921.
7 lembar
BB No.1108
16. Istana pada pesta ulang tahun Sultan Pontianak
KIT. No.0325/032
17. Komplek makam Sultan Pontianak
KIT. No.0817/006
18. Kraton Sultan Hamid II di Pontianak
Kempen No.516857
19. Singgasana keraton Sultan hamid II di Pontianak.
Kempen No.516856

20. Het rijk van Landak, West Borneo (Kerajaan Landak Kalimantan Barat)

1 lembar
Koleksi Peta F.De Haan No.K44

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

21. Pamflet tentang Kalimantan Barat , 12 Mei 1947.

1 lembar
Koleksi Pamflet No. 13.

22. Salinan surat kabar Panji Rakyat No. 51 Tahun ke-2 tentang rencana anggaran dasar Kalimantan Barat untuk menjadi daerah istimewa yang mempunyai pemerintahan sendiri dan turut menyusun Negara Indonesia Serikat, 13 Mei 1947.

2 lembar
Kementerian Pertahanan No. 788

23. Verslag bezoek Borneo West (Laporan kunjungan ke Kalimantan Barat), tanggal 20 – 27 Mei 1947.

12 lembar
Algemeene Secretarie No. 1314

24. Resolusi dari kongres Rakyat se-Kalimantan Barat yang diadakan pada tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 1950 di Pontianak tentang peninjauan kembali Kalimantan yang hanya satu provinsi dan usulan Kalimantan Barat sebagai otonom.

4 lembar
Kabinet Presiden RIS No.163

25. Nota Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (Ida Agoeng Gde Agoeng) tanggal 9 Agustus 1950 tentang persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Barat.

6 lembar
Kabinet Presiden RIS No. 163

26. Nota dari badan Pertimbangan Pemerintah Kalimantan Barat tentang telaah rencana pembentukan Kota Praja Pontianak. 11 Agustus 1950
5 lembar
Kabinet Presiden No. 825
27. Keputusan Presiden RI No.58 Th.1951 tentang pengangkatan Dr.Murdjani sebagai Gubernur Kalimantan. 1951
2 lembar
Sekcab Keppres No. 284
28. Jawaban Pemerintah mengenai rancangan Undang-Undang pembentukan daerah otonomi Provinsi Kalimantan Barat. 19 Oktober 1956.
19 lembar
Risalah DPR RI No.171
29. Undang-undang No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
38 lembar
Sekcab / UU No. 199
30. Undang-undang No. 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan perubahan UU No.25 tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4 lembar
Sekcab / UU Darurat No. 145

31. Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 1957 tentang pembagian Kalimantan dalam 3 provinsi otonom yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dengan berdasar Keputusan Presiden No.3/M/Tahun 1957 tertanggal 7 Januari 1957.

2 lembar
Kabinet Presiden RI No. 901

32. Tugu Katulistiwa di Pontianak
KIT No.0300/078

KUNJUNGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

33. Presiden Soekarno disambut oleh Panglima TT VI Kol. Sadikin dan Gubernur Milono, waktu tiba di Lapangan Udara Pontianak
Kempen No. 551208 kk 32

34. Suasana dalam rapat raksasa di Pontianak, Presiden Soekarno sedang memberi wejangan (foto tanggal 8 Desember 1955)
Kempen No.551208 kk 22

35. Pidato PJM Presiden Soekarno pada rapat raksasa di Sampit, 9 September 1959.

10 lembar
Pidato Presiden No. 115 A

36. Pidato PJM Presiden pada penancangan tiang-tiang pertama untuk proyek-proyek pembangunan Kalimantan Barat , Pontianak tanggal 26 Maret 1961.

3 lembar
Pidato Presiden No. 282

37. Ceramah Presiden Soekarno dihadapan para mahasiswa, pemuda dan pemimpin-pemimpin di gedung bioskop Abadi Pontianak mengenai masalah intelektual di masyarakat. 26 Maret 1961.

16 lembar
Pidato Presiden No.281

38. Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah memeriksa barisan kehormatan waktu tiba di Lapangan Udara Pontianak
Kempen No.550628 kk 1

39. Sambutan rakyat di sepanjang jalan waktu Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan tiba di Pontianak
Kempen No.k 550628 kk 1-4

40. Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah meletakkan karangan bunga waktu berkunjung ke Taman Pahlawan di Pontianak
Kempen No.550628 kk18

41. Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah mengunjungi kilang minyak kelapa yang diusahakan oleh pejuang pembangunan di Sungai Tanjung, Mempawah
Kempen No.550629 kk 14

42. Sambutan murid-murid sekolah waktu rombongan Wakil Presiden Mohammad Hatta tiba di Singkawang
Kempen No.550629 kk 18

43. Wakil Presiden Mohammad Hatta disambut oleh para penyambut waktu tiba di Sungai Pinggan (foto tanggal 1 Juli 1955)
Kempen No.550701 kk3

44. Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah meninjau perumahan di Perkampungan CTN di Sanggau
Kempen No.k 550701 kk 3- 6
45. Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama rombongannya disambut oleh penduduk waktu tiba di Sekadan
Kempen No.550702 kk 1
46. Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama rombongannya tengah mengunjungi Perusahaan penggergajian kayu, NV kalba di Pontianak (foto tanggal 5 Juli 1955)
Kempen No.550705 kk5

PERJUANGAN KEMERDEKAAN

47. Laporan dari Markas Besar Tentara Staf Umum tentang keadaan perlawanan rakyat Kalimantan Barat melawan Belanda di daerah Pemangkat, Mempawah, sekitar Kota Singkawang dan Bengkayang sekitar 1947 .
12 lembar
Kementerian Pertahanan No. 1289
48. Berkas tentang peresmian tugu peringatan korban penduduk Kalimantan Barat selama penjajah Jepang sekitar tahun 1947.
15 lembar
Algemeene Secretarie No. 1309
49. Laporan keadaan politik tentang gerakan rakyat Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) dalam menghadapi Belanda tahun 1948.
17 lembar
Djogya Documenten No. 5538

50. Gubernur Milono sedang meletakkan karangan bunga di Tugu Pahlawan di Pontianak
Kempen No.550628 kk 18

PEMBANGUNAN

51. Gebouwen en Werken te Pontianak , 2 Oktober 1889.
(Gambar pekerjaan dan bangunan di Pontianak)
1 lembar
Koleksi Peta Blad I/53
52. Jembatan di atas sungai di Singkawang, Kalimantan Barat
KIT No.125/47
53. Berkas tentang proyek pembangunan lapangan terbang di Singkawang tahun 1938.
30 lembar
BOW : BL.213
54. Oprichting van een luchtwachtgebouw in Singkawang (pembangunan ruang tunggu pesawat di Singkawang), 1941.
12 lembar
BB No.4126
55. Resolusi berasal dari seluruh Peserta Konferensi Kilat Jawatan Kemakmuran Provinsi Kalimantan yang diadakan di Banjarmasin 10 April sampai dengan 11 April 1953 tentang syarat- syarat penting bagi perkembangan Jawatan Kemakmuran dalam membantu pelaksanaan pembukaan Kalimantan. 11 April 1953
4 lembar
Kabinet Presiden No. 613

56. Prasaran yang disampaikan oleh Asisten Pribadi Presiden Sudjono Humardani pada Seminar dan Lokakarya Pelita II daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Nopember 1973 di Pontianak.

9 lembar
Marzuki Arifin No. 594

EKONOMI

57. Ringkasan tentang perdagangan dan pelayaran di Pontianak tahun 1846.

9 lembar
Borneo West No. 98

58. Peraturan mengenai agraria di Borneo West, 1919.

10 lembar
BB No.1113

59. Berkas penyerahan penggergajian kayu "Siantan" kepada D.I. Kalimantan Barat, 24 Nopember 1948.

3 lembar
Algemeene Secretarie No.862

60. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.182 Tahun 1953 tentang pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan mengenai penangkapan ikan sepat , 1953.

2 lembar
Sekkab Keppres No. 864

61. Proposal dari PT. Panca Usaha Trading & Coy P.S Ikan Lama tentang proyek Pertanian Pembudidayaan tanaman ubi kayu Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Dati II Sambas. 1 Juni 1982

50 lembar
Adam Malik No. 569

62. Kantor Oost Borneo Handel Maatschapij di Singkawang
KIT No. 0783/013
63. Pasar malam di Pontianak
Kempen No.516816
64. Pabrik karet CMO
KIT No.0643/019
65. Toko Cina di tepi hutan
KIT No. 0300/022
66. Pasar Karet di Pringin
KIT No.0639/053
67. Pelabuhan minyak Pontianak
KIT No.0761/026
68. Pembikinan kopra oleh penduduk kampung Podang
Kabupaten Ketapang, kelapa yang akan dibikin kopra
Kempen No.510821 kk 22
69. Tempat penjemuran kopra di Pontianak
Kempen No.510823 kk7
70. Gedung Yayasan kopra di Pontianak
Kempen No. k 550628 kk 4-1
71. Tempat pengasapan kopra rakyat di Desa Peniti (foto
tanggal 29 Juni 1955)
Kempen No.k 550629 kk 3 - 1
72. Pengambilan getah dari pohon damar di Nangatayap
Kempen No. 510917 kk 2
73. Pengambilan rotan di Kampung sebuah Kecamatan
Nangtanyap
Kempen No.510919 kk 10

74. Penggajian kayu besi oleh Suku Dayak diseluruh Kecamatan Nangtanyap, Ketapang (foto 17 September 1951)
Kempen No.510915 kk 5
75. Kompleks pertokoan di Singkawang Kalimantan Barat
KIT No.0831/063
76. Kapal "Kantoel" melayari Sungai Kapuas
KIT No. 0125/081
77. Pendaratan pesawat marine AL Java di Pontianak
KIT No.0050/046
78. Pemandangan penjual durian dalam kota Pontianak
Kempen No.516810
79. Pemandangan stasiun bus Kota Pontianak
Kempen No. 516814
80. Pemandangan dalam kota Pontianak dengan sampan-sampan di depan rumah
Kempen No.516819
81. Perahu-perahu untuk alat pengangkutan di sungai di Pontianak
Kempen No.516829
82. Pemandangan lalu lintas di sungai dimana perahu yang membawa hasil bumi dari pedalaman berkumpul di pangkalan dalam kota Pontianak
Kempen No.510821 kk11
83. Rotan hasil rakyat Kampung Melayu, Ketapang
Kempen No.510919 kk20

84. Jajaran sero yang siap untuk dipasang di laut sebagai alat penangkap ikan di daerah Pontianak
Kempen No.510823 kk29
85. Pembuatan jaring udang oleh penduduk Sukadana Kabupaten Ketapang
Kempen No.510905 kk4
86. Cara menganyam sero
Kempen No.510823 kk31
87. Hasil-hasil penangkapan ikan oleh rakyat di Ketapang
Kempen No.510821 kk27
88. Ikan Belida hasil rakyat di Kampung Sebrang Ketapang
Kempen No.510919 kk6

PENDIDIKAN

89. Gedung sekolah Tionghoa di Pontianak (foto tgl.23 Agustus 1951)
Kempen 510823 kk 39
90. Pemandangan dalam kelas di salah satu Madrasah, Sungai Besar Kalimantan Barat
Kempen No.510905 kk 14
91. Gedung Sekolah Madrasah di Sungai Besar, Ketapang
Kempen No.510917 kk 11
92. Gedung STN dan STPN di Pontianak
Kempen No.550629 kk 1-1

93. Data tentang Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar dan Penilik dalam rangka lomba peningkatan mutu sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat, 14 Juli 1995.

5 lembar
Departemen Agama No. 214

KESEHATAN

94. Laporan umum dari Residensi Borneo Barat kepada Aegemeene Secretarie tentang keadaan kesehatan penduduk di Kalimantan Barat tahun 1890.

2 lembar
Borneo West No.37

95. Komplek Rumah Sakit di Sambas
KIT No. 0300/020

96. Palang Merah Remaja berbaris di Kota Baru
KIT No.0336/036

PERIBADATAN

97. Lalu lintas di sungai terlihat beberapa sampan memuat muslim-muslim yang akan pergi ke masjid
Kempen No. 516886

98. Pembacaan khotbah di Masjid Pontianak
Kempen No.516893

99. Bentuk masjid di Sunday, Ketapang
Kempen No.510919 kk1

PEMUKIMAN

100. Pemukiman Cina di Pontianak
KIT No.0761/012
101. Kuil Cina di Singkawang
KIT No. 0792/023
102. Pemukiman kampung Dayak
KIT No. 0831/044
103. Pemukiman kampung Melayu di Pontianak
KIT No.0761/014
104. Rumah pesanggrahan orang Dayak
KIT No. 0861/089
105. Rumah di tepi Sungai Kapuas Pontianak
Kempen No.516831
106. Rumah di atas perahu Pontianak
Kempen No.516843
107. Rumah-rumah penduduk di tepi Sungai Bawang di
Pontianak tanggal 21 Agustus 1951
Kempen No.510821 kk18
108. Rumah-rumah penduduk di Kampung Sukadana ,
Ketapang
Kempen No.510821 kk 44
109. Pemukiman rumah diatas Sungai Bemban Kalimantan
Barat
KIT No.0945/079
110. Rumah kayu didaerah pecinan Pontianak Kalimantan
Barat.
KIT No.0761/017

- 111. Rumah nelayan semi permanen di Nangka Semangat,
Sungai Lekoyan Kalimantan Barat.
KIT No.0831/037
- 112. Rumah orang dayak di kampung Merajuh, Sungai
Landak Kalimantan Barat
KIT No.0830/044
- 113. Pemukiman ditepi laut Pemangkat Kalimantan Barat
KIT No.0300/032
- 114. Pemukiman ditepi Sungai di Singkawang
KIT No.0125/045
- 115. Pemandangan kota Pontianak
Kempen No.516809
- 116. Rumah Residen Pontianak
KIT No.0761/016

ETNIS DAN BUDAYA

- 117. Land inhabited by Dayak People, 1840.
1 lembar
Koleksi Peta F.De Haan No.E52
- 118. Nota hubungan antara orang China dan Dayak di
Kalimantan Barat terutama di Sambas tahun 1892.
44 lembar
Borneo West 180
- 119. Pakaian asli Ketapang, Kalimantan Barat
Kempen No.510915 kk 1
- 120. Pakaian kombinasi pengaruh Islam dan Cina dalam
upacara perkawinan di Ketapang, 15 September 1951
Kempen No. 510915 kk10

121. Surat dari Pedoman Besar PPPKI yang isinya tugas untuk menyelidiki adat istiadat perkawinan Suku Dayak. 16 Maret 1954
1 lembar
Kabinet Presiden No. 184
122. Upacara tujuh (7) bulan di Ketapang, Kalimantan Barat
Kempen No.510915 kk 7
123. Malam kesenian Satria Dayak, Pontianak
Kempen No.501466
124. Pesta Tari orang Dayak
KIT No.0558/055
125. Pencak Silat asli Ketapang, Kalimantan Barat
Kempen No.510915 kk 15
126. Tarian adat bersama oleh Suku Dayak di Nangtanyap,
Kalimantan Barat
Kempen No.510918 kk 1
127. Tari Garunggang dari Suku Dayak di Nangtanyap
Kempen No.510919 kk 4
128. Peta persebaran Suku Dayak
KIT No.0984/053
129. Beberapa gadis Dayak dari Hulu Kapuas
KIT No.0442/020
130. Wanita Dayak, KIT No.0443/066
131. Suku Bangsa Indonesia di Pontianak dan bentuk rumah
di sana
Kempen No.510823 kk 18

132. Wanita penduduk Peniti, Pontianak, 5 September 1951
Kempen 510905 KK 1
133. Wanita Suku dayak Nangtanyap, Ketapang
Kempen No.510917 kk 12

PERAYAAN

134. Upacara bendera pada hari Proklamasi 17 Agustus 1951
di Pontianak
Kempen No.516864
135. Arak- arakan murid Sekolah Rakyat dalam perayaan
17 Agustus 1951 di Pontianak
Kempen No.516804
136. Aubade murid-murid sekolah di Kantor Karesidenan
Kalimantan Barat
Kempen No.516860
137. Arak-arakan mobil dalam perayaan 17 Agustus 1951 di
Pontianak
Kempen No.516885
138. Arak- arakan dengan bendera dan semboyan-semboyan
di Pontianak
Kempen No.516909
139. Perlombaan dayung di Sungai Mahakam
Kempen No.510823 kk25
140. Sepak bola antara kesebelasan Pontianak & Singkawang
Kempen No.510919 kk 45

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Kalimantan Barat Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

